



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN 2020

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN BUMN
2020**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatNya kita semua mampu melewati tahun 2020 yang sarat dengan tantangan dan berhasil mencatat kinerja yang memuaskan di tengah stabilitas ekonomi yang kurang baik akibat pandemi Covid19. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama serta Pegawai Kementerian BUMN atas kerja keras selama tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi Republik Indonesia termasuk bagi Kementerian BUMN dan BUMN. Dampak Covid-19 terjadi tidak hanya di sektor kesehatan tetapi secara signifikan juga mempengaruhi sektor ekonomi. Secara global, perekonomian dunia mengalami kontraksi ekonomi yang dalam selama tahun 2020 sebagai akibat penyebaran Covid-19. Adanya wabah Covid-19 juga mempengaruhi kinerja keuangan sebagian besar BUMN menyebabkan penurunan kinerja BUMN dan berdampak pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian BUMN Tahun 2020 yang belum tercapai.

Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Kementerian BUMN sebagai Pembina BUMN untuk memastikan BUMN tetap *survive* di tengah resesi ekonomi yang cukup dalam. Adanya pandemi Covid19 telah dijadikan momentum bagi Kementerian BUMN untuk mengakselerasi berbagai program transformasi dalam pembinaan BUMN termasuk program digitalisasi untuk dapat mencapai target kinerja tahun 2020.

Nilai Prestasi Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2020 berhasil tercapai 99,1 atau masuk kategori memuaskan. Dari total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), 14 IKU berhasil tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara itu 5 IKU belum mencapai target. Ketidaktercapaian target tersebut terutama disebabkan karena dampa

k pandemi Covid19 pada sebagian besar kinerja BUMN tahun 2020. Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi domestik dan internasional diharapkan kinerja BUMN juga akan meningkat di tahun 2021. Selain bertujuan untuk mencari laba, BUMN juga menjalankan perannya sebagai *Agent of Development* melalui program BUMN untuk Indonesia.

Seluruh pencapaian kinerja Kementerian BUMN selama tahun 2020 telah didokumentasikan dalam buku Laporan Kinerja ini. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Kementerian BUMN.

Perbaikan dan peningkatan kinerja Kementerian BUMN dalam membina BUMN dengan berlandaskan nilai AKHLAK terus kami laksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada Rencana Strategi Kementerian BUMN Tahun 2020 – 2024. Ke depannya, kami akan semakin mengakselerasi program-program peningkatan kinerja BUMN dan memperkuat kompetensi SDM Kementerian BUMN untuk menjadi Pembina BUMN yang kompeten dengan berlandaskan nilai-nilai AKHLAK.

Jakarta, April 2021
Menteri BUMN,



Erick Thohir

MILESTONE PEMANGKU JABATAN MENTERI BUMN



01 | **Tanri Abeng** (1998 - 1999)

Beliau merupakan putra kelahiran Pulau Selayar, Sulawesi Selatan 78 tahun silam (7 Maret 1942). Adapun pendidikan formal yang telah beliau peroleh adalah Program Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Makassar, Program *Master of Business Administration*, *University of New York Buffalo* dan program Doktoral Ilmu Multi Disiplin di Universitas Gajah Mada.

Tak hanya cemerlang dibidang akademis, beliau juga turut cemerlang dikarirnya seperti menjabat Presiden Direktur di *Bakrie and Brothers* (1981-1991), Direktur Bata Indonesia (1993-1998), kemudian pada tahun 1998-1999 menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, atau sekarang lebih kita kenal Kementerian BUMN.



02 | **Laksamana Sukardi** (1999-2000 dan 2001-2004)

Lahir di Jakarta, 1 Oktober 1956 beliau meraih gelar Sarjana Jurusan Teknis Sipil, Institut Teknologi Bandung (1979). Sebelum menjadi seorang politisi, beliau merupakan salah satu Ekonom dan Bankir di Bank Lippo serta Lippo Group.

Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau lebih dahulu menjabat sebagai Anggota MPR RI pada tahun 1992-1997, kemudian beliau diangkat menjadi Menteri Negara Investasi dan Pemberdayaan BUMN pada tahun 1999-2001. Kemudian dilanjutkan menjadi Menteri Negara BUMN pada era Kabinet Gotong Royong di tahun 2001-2004.



03 | **M. Rozy Munir** (2000)

Merupakan putra kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 16 April 1943. Beliau mendapatkan pendidikan dengan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Jakarta). Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya serta meraih gelar Magister di *Hawai University*, Amerika Serikat.

Beliau memiliki karir yang gemilang, terlihat pada beberapa jabatan yang telah dipercayakan kepada beliau, seperti Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Infrastruktur, Universitas Indonesia, Anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja, Anggota Lembaga Sensor Film, Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, serta menjadi Duta Besar Indonesia untuk Qatar.

**04****I Nyoman Tjager****(2000-2001) - Dirjen Pembinaan BUMN**

I Nyoman Tjager SH, MA, lahir di Tabanan, Bali, 30 Maret 1950. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pascasarjana Ekonomi, *Fordham University* New York-USA serta Program Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada. Meniti karir pada Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Staf Biro Hukum (1978), dan menduduki sejumlah jabatan penting, Komisaris PT Jakarta Lloyd, (1993-2001), Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun (1999-2003), dan Staf Ahli Menteri Negara BUMN-Bidang KUK Kementerian BUMN (2001-2005), Staf mengajar Fakultas Hukum Program Notariat Universitas Indonesia, (2001-2007), komisaris dan ketua Komite Audit PT Bank Lippo Tbk, (2003-2008), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (2008-2011).

**05****Soegiharto****(2004-2007)**

Soegiharto (lahir di Medan, Sumatra Utara, 29 April 1955) merupakan Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan pendidikan Magister di Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Gajah Mada.

Beliau pernah menjabat sebagai Staf Senior Indonesia *Bank Trust Company and Chemical* (1992-2004), Direktur Keuangan dan Direktur Utama Medco Energi (1991-2004), *Regional Advisor Air Liquide Group, France*, dan Menteri BUMN pada tahun 2004-2007.

**06****Sofyan Djalil****(2007-2009)**

Lahir di Aceh pada 23 September 1953, beliau memperoleh Ph.D dalam bidang *International Financial and Capital Market Law and Policy* dari the *Fletcher School of Law and Diplomacy-Tufts University* (1993), setelah menyelesaikan *Master of Arts in Law and Diplomacy - MALD* (1991) dan *Master of Arts in Public Policy* dari Universitas yang sama di tahun 1989. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1984.

Jabatan yang telah beliau tempati selain sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu I (9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (2004 – 2007), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014 – 2015), dan terakhir adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (2016 - Sekarang).

**07****Mustafa Abubakar****(2009-2011)**

Merupakan seorang Putra Kelahiran Pidie, Nangroe Aceh Darussalam tanggal 15 Oktober 1949. Beliau mengawali Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana di Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (1977), Magister Institut Pertanian Bogor dan Doktor Institut Pertanian Bogor (2004).

Selain menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Bank Dunia pada Bank Rakyat Indonesia (1979-1985), Konsultan Bank Dunia pada Bank Indonesia (1986-1989), Irjen Departemen Kelautan dan Perikanan (1999-2006), Pejabat Gubernur NAD (Desember 2005 - Februari 2007) dan Direktur Utama Perum BULOG (2007-2009).

08

Dahlan Iskan

(2011-2014)



Merupakan seorang Putra Kelahiran Magetan, Jawa Timur tanggal 17 Agustus 1951. Beliau memperoleh gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) di bidang komunikasi dan penyiaran agama Islam dari IAIN Walisongo, Semarang pada 8 Juli 2013 dan Profesor Tamu dari Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dan Doktor Honoris Causa (HC). Universitas Arellano, Manila, Filipina.

Tak hanya menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau juga pernah menjabat sebagai CEO Jawa Pos, Komisaris PT Fangbian Iskan Corporindo (FIC) (2009), dan Direktur Utama PT PLN (Persero) (2009-2011).

09

Rini M. Soemarno

(2014-2019)



Merupakan Putri Kelahiran Mayland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Beliau mengawali pendidikan di Fakultas Ekonomi, *Wellesly College Massachusetts*, USA (1981).

Sepanjang karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta (1998), Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004), dan Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005) dan Menteri BUMN (2014-2019).

10

Erick Thohir

(2019-Sekarang)



Lahir pada tanggal 30 Mei 1970. Ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014.

Erick Thohir meraih *Bachelor of Arts* dari *Glendale University* pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari *National University of California* pada tahun 1993.

Karir sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, antara lain adalah sebagai Direktur ANTV (2014), Komisaris Utama Mahaka Media, dan Ketua INASGOC Badan Pengelola Asian Games (2018).

MILESTONE PEMANGKU JABATAN MENTERI BUMN



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Milestone Pemangku Jabatan BUMN	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Ringkasan Eksekutif	x
Penghargaan Kementerian BUMN Tahun 2020	xi
BUMN Untuk Indonesia	xiii

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN	6
D. Penataan Organisasi Kementerian BUMN	7
E. Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN	11
F. Profil Pejabat Kementerian BUMN	12
G. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	14

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024	17
B. Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020	19

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

A. Evaluasi Kinerja Tahun 2020	23
B. Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran Kementerian BUMN	53
D. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	54

PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN	59
---	----

PENUTUP	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020	24
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2020	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020	27
Tabel 3.3	Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	29
Tabel 3.4	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	30
Tabel 3.5	Capaian Triwulan Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	30
Tabel 3.6	Capaian Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	30
Tabel 3.7	Realisasi IKU Rasio Keterwakilan Perempuan per Triwulan	31
Tabel 3.8	Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	32
Tabel 3.9	Nilai Indeks Aspek SPBE	33
Tabel 3.10	Capaian Kualitas Laporan Keuangan	34
Tabel 3.11	Capaian Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	34
Tabel 3.12	Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN	35
Tabel 3.13	Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	37
Tabel 3.14	Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	38
Tabel 3.15	Capaian Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	38
Tabel 3.16	Capaian Jumlah BUMN/ anak yang Melakukan IPO	39
Tabel 3.17	Anak BUMN yang Melakukan IPO 2018-2020	40
Tabel 3.18	Daftar BUMN yang Belum Mendapat Persetujuan Restrukturisasi	41
Tabel 3.19	Total Saldo Utang RDI/SLA dan Utang Tidak Produktif dari BUMN	42
Tabel 3.20	Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	43
Tabel 3.21	Data Ekspor BUMN tahun 2018-2019	43
Tabel 3.22	Capaian Perbaikan Level INDI 4.0 BUMN/anak	44
Tabel 3.23	Daftar BUMN Asesi	45
Tabel 3.24	Orientasi Pilihan Strategis dari 12 BUMN	45
Tabel 3.25	Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	46
Tabel 3.26	Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018-2020	46
Tabel 3.27	Capaian Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	46
Tabel 3.28	Capaian Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	48
Tabel 3.29	Rincian Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	48
Tabel 3.30	Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	49
Tabel 3.31	Rincian CAPEX BUMN 7 Tahun Terakhir	49
Tabel 3.32	Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT	49
Tabel 3.33	Capaian Net Profit	50
Tabel 3.34	Rincian Net Profit 7 Tahun Terakhir	50
Tabel 3.35	Capaian Kapitalisasi Saham BUMN	50
Tabel 3.36	Daftar BUMN/anak yang masuk Bursa Saham	52
Tabel 4.1	BUMN Penerima dan Progres Dana PMN dan IP PEN	61
Tabel 4.2	Rincian BUMN Penerima PMN TA 2020	63
Tabel 4.3	Rincian BUMN Penerima PMN TA 2021	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Stuktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2020	10
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Unit Kerja	11
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Kementerian BUMN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 3.1	Nilai Indeks Aspek SPBE	31
Gambar 3.2	Grafik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	33
Gambar 3.3	<i>Framework Assesment</i> INDI 4.0	44
Gambar 3.4	10 BUMN dengan Kontribusi Terbesar Kepada Negara	48
Gambar 3.5	Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2020	65
Gambar 3.6	Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2015-2020	59
Gambar 4.1	Dasar Hukum Pelaksanaan PEN untuk UMKM	63
Gambar 4.2	Realisasi Belanja Subsidi Bunga/Margin Tahun Anggaran 2020	64
Gambar 4.3	SIBV <i>Safe Guard Label</i> Kementerian BUMN	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN selama tahun 2020 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2019 dengan berbagai perbaikan serta penerapan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dalam rangka perubahan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Kementerian BUMN.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kementerian BUMN telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dengan 9 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Scorecard yaitu pembobotan pada target IKU yang dikombinasikan pada Nilai Kinerja Organisasi sebagaimana pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN.

Pada tahun 2019, Kementerian BUMN telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang didasari oleh Peta Strategi. Kemudian, pada pertengahan tahun 2020 PK telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024. Adapun ringkasan capaian Kinerja Tahun 2020 Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

15 IKU (≥ 100)

78,9%

4 IKU (< 100)

21,1%

1

Uraian IKU yang capaiannya mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan (capaian $\geq 100\%$) adalah:

1. Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN
4. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN
5. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan;
6. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO
7. Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri
8. Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/Anak;
9. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN
10. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN
11. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam BOD/BOC BUMN
12. Jumlah BUMN yang masuk peringkat global
13. Pembentukan Holding BUMN
14. Net Profit
15. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUMN Tidak Sehat)

2

Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian $< 100\%$) adalah:

1. Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, dan PNBP)
2. Realisasi Belanja Modal (CAPEX)
3. Kapitalisasi Saham BUMN
4. Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat.

Beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang belum tercapai di atas, dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 pada sektor perekonomian secara Nasional.

PENGHARGAAN KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2020



01 Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Menuju Inofatif



02 Penghargaan Saveguard Label SIBV Tahun 2020



03 Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa Paling Transparan Tahun 2020



04 Penghargaan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Opini WTP



05

Juara 1 Utilisasi Barang Milik Negara
Tahun 2020



06

Peringkat I Nasional Dalam Penerapan
Sistem Merit Tahun 2019



BUMN

KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

BUMN UNTUK INDONESIA

Selain berkontribusi pada perekonomian bangsa, BUMN juga mempunyai peran sebagai Agent of Development. Wujud pelaksanaan peran BUMN sebagai Agent of Development dilakukan melalui program BUMN Untuk Indonesia.

1

LRT JABODEBEK

Light Rail Transit Jabodebek merupakan lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodebek. Pembangunan LRT Jabodebek ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015, Pemerintah menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Untuk membangun prasarana LRT Jabodebek yang meliputi jalur, stasiun, dan fasilitas operasi. Pada tahun 2016, Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tersebut diubah melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016 yang menugaskan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana depo dan menunjuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator LRT Jabodebek. Nilai proyek pembangunan LRT Jabodebek sebesar Rp23,3 Triliun. Sampai dengan Januari 2021, progress pembangunan LRT Jabodebek telah mencapai 81,9 % dengan U-Shaped Girder yang sudah terpasang. LRT ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal Juli 2022. LRT Jabodebek mampu menampung 500.000 penumpang ketika sudah beroperasi.



LINE 1
Cawang-Cibubur

92,9%



LINE 2
Cawang-Kuningan-
Dukuh Atas

79,7%



LINE 3
Cawang-Bekasi
Timur

89,7%



Depo Bekasi Timur

35,6%

2

KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCIC)

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Jakarta – Bandung. Berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Perkebunan Nusantara VIII untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta cepat tersebut.

Konsorsium badan usaha milik bersama tersebut membentuk perusahaan yang mengoperasikan jaringan Kereta Cepat Jakarta Bandung bersama China Railways dengan nama PT Kereta Cepat Indonesia-China. Kereta Cepat Jakarta Bandung ini memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung dengan 4 stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Tegalluar dan satu depo di Tegalluar. Sampai dengan Desember 2020, progress pembangunan proyek tersebut telah mencapai 65,70 %. Kereta Cepat Jakarta Bandung ini ditargetkan selesai serta beroperasi pada tahun 2022 mendatang dan mampu menampung 109 ribu penumpang per hari serta memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya 36 menit (perjalanan langsung) dan 46 menit (perjalanan tak langsung).



3 PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS)

JTTS merupakan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di pulau Sumatra, dari Lampung hingga Aceh. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2015, Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pembangunan 24 ruas tol yang berada di Sumatra. Berdasarkan kajian keuangan dan estimasi awal, nilai investasi untuk 24 ruas tol tersebut di luar pengadaan tanah adalah sebesar Rp476 triliun. Sampai saat ini, panjang tol yang sudah terbangun 364 km dari 2.818 km (ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu Tebing Tinggi, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Palembang-Indralaya) dan ditargetkan akan selesai dan beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2024.



Ruas Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

NO	RUAS	PANJANG TOTAL (KM)	TOTAL BIAYA INVESTASI		
			INVESTASI (RP M)	PINJAMAN (RP M)	EKUITAS (RP M)
I. RUAS OPERASI					
1.	Medan-Binjai	17	2.500	1.486	1.014
2.	Bakauheni-Terbanggi Besar	140	16.795	8.078	8.717
3.	Palembang - Indralaya	22	3.301	990	2.311
4.	Terbanggi Besar - Pematang Panggang				
5.	Pematang Panggang - Kayu Agung	185	21.950	9.574	12.376
SUB TOTAL		364	44.546	20.128	24.418
II. RUAS KONSTRUKSI					
6.	Pekanbaru - Dumai	131	16.211	6.653	9.558
7.	Kisaran - Indrapura	24	6.048	2.117	3.931
8.	Kuala Tanjung - Tb Tinggi - Parapat	143	21.198	9.418	11.780
9.	Sigli - Banda Aceh	73	12.354	3.706	8.648
10.	Sp Indralaya - Muara Enim	119	24.107	7.232	16.875
11a.	Sicincin - Padang	35	4.884	2.884	2.000
11b.	Pekanbaru - Pangkalan	95	21.242	5.311	15.932
12a.	Taba Pananjung - Bangkalan	18	7.052	1.058	5.995
13.	Binjai - Langsa	110	23.354	7.006	16.348
SUB TOTAL		771	136.450	45.385	91.066
III. RUAS PERSIAPAN KONSTRUKSI					
14.	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	115	23.790	4.758	19.032
11c.	Payakumbuh - Sicincin	77	30.826	7.706	23.120
11d.	Pangkalan - Payakumbuh	49	21.143	2.250	18.893
12b.	Lubuk Linggau - Taba Pananjung	78	30.561	4.584	25.976
SUB TOTAL		364	44.546	20.128	24.418
II. RUAS KONSTRUKSI					
15.	Langsa - Lhokseumawe	130	15.456	4.637	10.819
16.	Lhokseumawe - Sigli	157	18.956	5.687	13.269
17.	Betung - Tampino - Jambi	190	25.192	6.369	18.824
18.	Jambi - Rengat	190	24.482	4.896	19.586
19.	Rengat - Pekanbaru	175	21.220	6.366	14.854
20.	Dumai - Sp Sigambal - Rantau Prapat	174	21.656	2.497	15.159
21.	Rantau Prapat - Kisaran	100	12.868	3.860	9.008
22.	Palembang - Tanjung Api Api	70	14.289	2.858	11.431
23.	Prapat - Tarutung - Sibolga	100	28.488	5.698	22.790
24.	Batu Ampar - M Kuning - Hang Nadim	25	6.250	1.875	4.375
SUB TOTAL		1.311	188.857	48.742	140.114
TOTAL		2.765	476.173	133.553	342.619



Berdasarkan kajian keuangan dan estimasi awal, nilai investasi untuk 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol Trans Sumatera, di luar biaya pengadaan tanah, adalah sebesar Rp476 Triliun dengan komposisi porsi pendanaan dari ekuitas sebesar Rp343 Triliun (termasuk dukungan konstruksi senilai Rp24 Triliun) dan porsi pinjaman sebesar Rp133 Triliun. Pembangunan proyek ini ditargetkan akan selesai dan dapat dioperasikan secara keseluruhan pada tahun 2024.

4 PROGRAM STRATEGIS NASIONAL - 35 GW oleh PT PLN (PERSERO)

Sebagai salah satu BUMN yang memberikan dukungan energi nasional, Perusahaan Listrik Negara atau yang kita kenal dengan PT PLN (Persero) ini turut menyukseskan Program Strategis Nasional yang berupa peningkatan kapasitas pembangkit listrik hingga 35 GW, adapun progres yang telah berjalan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut

A

Progres pembangunan program 35 GW hingga Desember 2020 yaitu 9.931 MW (28%) telah beroperasi 17.715 MW (50%) dalam tahap konstruksi 6.528 (18%) dalam tahap kontrak /PPA belum konstruksi 839 MW (2%) dalam tahap pengadaan dan 724 MW (2%) dalam tahap perencanaan

B

Khusus di tahun 2020 terdapat penambahan kapasitas pembangkit sebesar 3.207,5 MW, yang terdiri dari 818,39 MW (27%) merupakan pembangkit milik PLN dan 2.253,68 (73%) merupakan pembangkit milik IPP.

C

Progress pembangkit program 35.736 MW sesuai RUPTL 2019 2028 adalah sebesar 35.736 MW dengan komponen:

- Jawa Madura Bali (18.451MW)
- Kalimantan (3.528 MW)
- Sulawesi (2.570 MW)
- Maluku Papua Nusra (1.689 MW)
- Sumatera (9.498 MW)

5

PROGRAM STRATEGIS PT PERTAMINA (PERSERO)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Terdapat 14 proyek Pertamina yang menjadi Proyek Strategis Nasional di sektor hulu, hilir dan energi bersih terbaru tahun 2020-2024



Titik Lokasi Proyek Pertamina yang menjadi Proyek Strategis Nasional Tahun 2020-2024

Business Stream	Project	Nilai Capex	Target Onstream
Hulu	1 Proyek Jambaran Tiung Biru	US\$ 1.5 Milyar	2021
Refinery & Petrochemical*	2 Grass Root Refinery Tuban 3 RDMP Dumai 4 RDMP Plaju 5 RDMP Cilacap 6 RDMP Balikpapan 7 Polypropylene Balongan	US\$ 16.7 Milyar US\$ 1.3 Milyar US\$ 1.3 Milyar US\$ 3.6 Milyar US\$ 7.1 Milyar US\$ 0.3 Milyar	2026 2027 2027 2027 2023** 2024
Commercial & Trading	8 Tanki BBM Indonesia Timur 9 Tanki LPG Indonesia Timur	IDR 205 Milyar IDR 1279 Milyar	2022 2021
Gas dan LNG	10 Pembangunan Jaringan Gas Kota (Nasional)	IDR 3,8 T (APBN) IDR 29,2 T (PGN)	2021 2022
Energy Bersih & Terbarukan	11 Gasifikasi Batu Bara Tj. Enim 12 Green Diesel RU IV Cilacap 13 Green Refinery RU III Plaju 14 Katalis Merah Putih	US\$ 2.1 Milyar US\$ 0.3 Milyar US\$ 0.7 Milyar IDR 170 Milyar	2026 2023 2024 2022

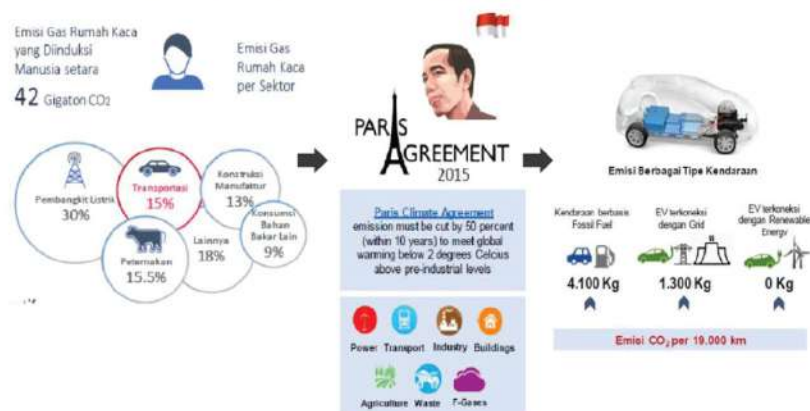
Ringkasan Perencanaan Proyek Pertamina yang menjadi Proyek Strategis Nasional Tahun 2020-2024

6

PROGRAM EKOSISTEM INDUSTRI EV BATTERY DI INDONESIA

Pengembangan *EV Battery* sejalan dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dari sektor transportasi dalam rangka mempercepat realisasi program, dibentuk Tim Percepatan Pengembangan *EV Battery* BUMN melalui Keputusan Menteri No SK-26/MBU/Wk1/05/2020 dan SK-28/01/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan *EV Battery* BUMN. Diharapkan semakin besar peningkatan tren global dalam pengembangan EV yang didorong oleh berbagai regulasi dan peranan besar dalam pengembangan ekosistem *EV Battery Value Chain Businesses*.

EV Battery sebagai Upaya Penanggulangan Emisi Global



Pemerintah menugaskan BUMN untuk membangun Ekosistem Industri EV Battery di Indonesia



BUMN
KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA



Pemain SDA Terbesar di Indonesia

#2 dalam Nikel dengan >20% sumber Indonesia, #1 dalam Tembaga, Emas, Aluminium & Timah, #3 dalam Batubara

Perusahaan Minyak Nasional, Fortune 175

#1 dalam produksi dan distribusi di Indonesia, >7000 POM bensin di seluruh Indonesia

Perusahaan Pembangkit & Distribusi Listrik Nasional

100% market share dalam distribusi di seluruh Indonesia

7

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI BATANG OLEH PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYA KUSUMA (PERSERO)

Kawasan Industri Batang merupakan Kawasan Industri prakarsa Pemerintah yang dibangun untuk menangkap peluang momentum relokasi investasi asing. Rencana pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang tersebut akan dilakukan pada lahan milik PT Perkebunan Nusantara XI yang terletak di Kabupaten Batang dengan luas $\pm 4.326,8$ ha yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan diawali fase I pengembangan lahan seluas ± 450 ha dengan kebutuhan dana sebesar Rp 13.342 sehingga dibutuhkan akselerasi dalam proses pengembangan tahap awal tersebut. Area industri akan difokuskan pada sektor Otomotif, Tekstil, Kimia, Logistik, ICT, High Tech dengan potensi serapan tenaga kerja mencapai 300.000 orang.

Keunggulan Kawasan



Aksesibilitas



Kunci Sukses Pembangunan



Kawasan Perencanaan Terletak di Koridor Industri Utara Pulau Jawa

Terletak 50 km dari Bandara Ahmad Yani 65 km dari Pelabuhan Tanjung Emas 4 jam dari Jakarta 1 jam dari Semarang

150,000

Peluang Lapangan Pekerjaan Baru untuk Kawasan seluas 4,300 HA

8

PEMBANGUNAN KAWASAN MANDALIKA OLEH PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dilakukan untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2022. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terbagi menjadi tiga bagian lokasi, yaitu Sektor Barat; Sektor Tengah (Inti); serta Sektor Timur. Sektor yang saat ini eksisting atau yang sudah ada adalah Sektor Barat dimana saat ini sudah ada Kantor Perwakilan ITDC, Komplek Masjid Nurul Bilad, Hotel Pullman, Hotel Novotel serta beberapa homestay yang lain, sementara untuk sektor tengah dan timur saat ini masih dalam tahap pembangunan. Sektor tengah nantinya akan dibangun jalan khusus Kawasan yang akan digunakan juga sebagai Sirkuit MotoGP pada tahun 2022. Sementara untuk Sektor Timur akan dibangun Theme Park, Area Golf, dan beberapa spot destinasi pariwisata yang akan disewakan kepada investor.



Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena pada Kawasan Mandalika khususnya didukung oleh beberapa destinasi pariwisata di sekitarnya, diantaranya adalah Wisata Bahari: TWP Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan; Ekowisata: Taman Nasional Gunung Rinjani, Gunung Tambora; KSPP/KPPN: KSPN Pantai Selatan Lombok dskt, KSPN Rinjani dskt, KSPN Gili Tramenas dskt; serta Geopark: Geopark Global Rinjani dan Tambora.





1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Negara memiliki peran yang penting dalam melaksanakan penguasaan pada kekuatan ekonomi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat 3 “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan yang dimaksud bukan untuk memonopoli, melainkan untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup seluruh Rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menetapkan sejumlah peraturan sebagai landasan dan acuan dalam kebijakan pembinaan BUMN, yaitu:



Di Indonesia, Menteri Keuangan diposisikan sebagai pengelola kekayaan Negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan permodalan/kepemilikan, sementara Menteri BUMN berwenang atas operasional dan pengelolaan/ manajemen BUMN. Oleh karena itu, Menteri BUMN berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil pemegang saham pada Persero dan pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Kewenangan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

TUJUAN KEMENTERIAN BUMN



Pelaksanaan maksud dan tujuan pendirian tersebut sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi dan Misi Presiden kemudian diturunkan menjadi Visi dan Misi Kementerian BUMN dan dimuat pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

VISI KEMENTERIAN BUMN

“Kementerian BUMN mempunyai visi sebagai Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

MISI KEMENTERIAN BUMN

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
- Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian BUMN;
- Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham;
- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

5 PRIORITAS KEMENTERIAN BUMN



Kelima prioritas ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan serta arahan strategis di Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendirian BUMN, serta menciptakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu bersaing dengan swasta baik dalam tingkat regional maupun global.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengangkat tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, adil dan Berkesinambungan”. Kementerian BUMN dalam Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerja (RKT/Renja) Tahun 2020 telah menerjemahkannya dalam berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Pada tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 19 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian BUMN. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Kementerian BUMN didukung oleh Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, 4 Unit Eselon I dan 23 Unit Eselon II. Untuk memastikan ketercapaian target kinerja Kementerian BUMN tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, Indikator Kinerja tersebut kemudian disepakati dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Menteri BUMN.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Kementerian BUMN. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerjanya.

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN BUMN

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/3/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN dan bertanggung jawab kepada Presiden RI dengan tugas dan fungsi Kementerian sebagai berikut:

TUGAS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

FUNGSI KEMENTERIAN BUMN

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, Kementerian BUMN memiliki empat unit Eselon I yang terdiri atas Sekretariat Kementerian BUMN, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, serta Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memiliki Staf Ahli Kementerian BUMN yaitu pada bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Bidang Industri dan Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM.

Dengan adanya mandat Presiden Republik Indonesia bahwa diperlukan adanya penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, maka Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/3/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengoptimalkan jumlah Eselon I dan Eselon II hingga meniadakan sebagian besar Eselon III dan Eselon IV.

Di Lingkungan Kementerian BUMN, hanya tersisa 5 (lima) Bagian (level Eselon III) dan 3 (tiga) Subbagian (Eselon IV) yang mana berdasarkan tugas dan fungsinya tetap dipertahankan untuk mendukung proses bisnis tugas dan fungsi di Kementerian BUMN. Adapun 5 bagian tersebut adalah:

- Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
- Bagian Kepegawaian (Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian);
- Bagian Dukungan Strategis dan Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Rumah Tangga (Biro Umum dan Keuangan); dan
- Bagian Tata Usaha dan Keuangan (Biro Umum dan Keuangan).

Pada level Subbagian (Eselon IV), tersisa 3 (tiga), yaitu:

- Subbagian Dukungan Strategis Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis);
- Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis); dan
- Subbagian Protokol (Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis).

Tugas dan fungsi unit Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II, dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

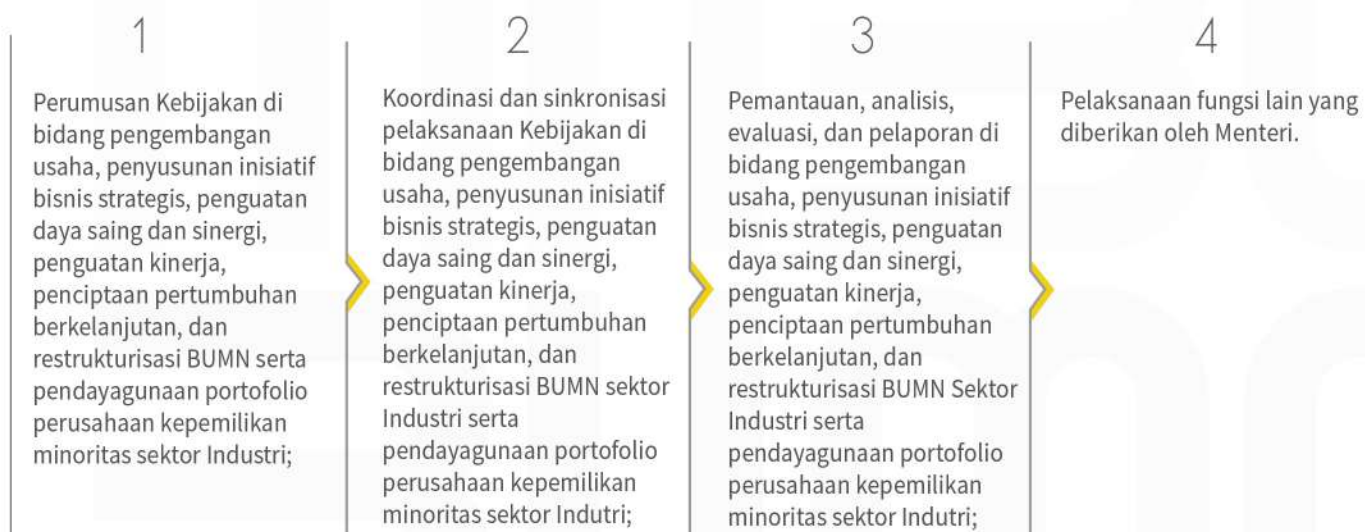
1

WAKIL MENTERI BUMN I

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II memiliki ruang lingkup bidang tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian BUMN dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Wakil Menteri BUMN I juga melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi badan usaha milik negara sektor industri dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Industri.

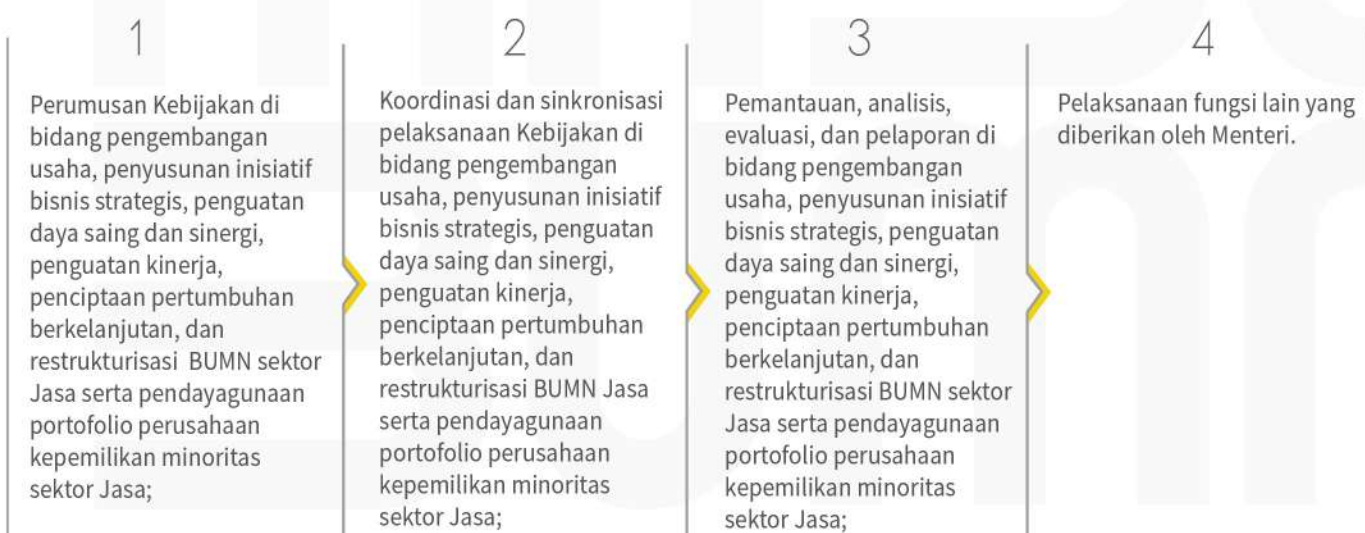
Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I menyelenggarakan fungsi:



2 WAKIL MENTERI BUMN II

Sebagaimana Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II turut melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN yang meliputi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, dan restrukturisasi BUMN sektor Jasa dan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor Jasa.

Dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian BUMN seperti penjelasan pada paragraf sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II menyelenggarakan fungsi:



3

SEKRETARIAT KEMENTERIAN BUMN

Sekretariat Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- Koordinasi dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- Pengelolaan data dan informasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan BUMN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan informasi BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

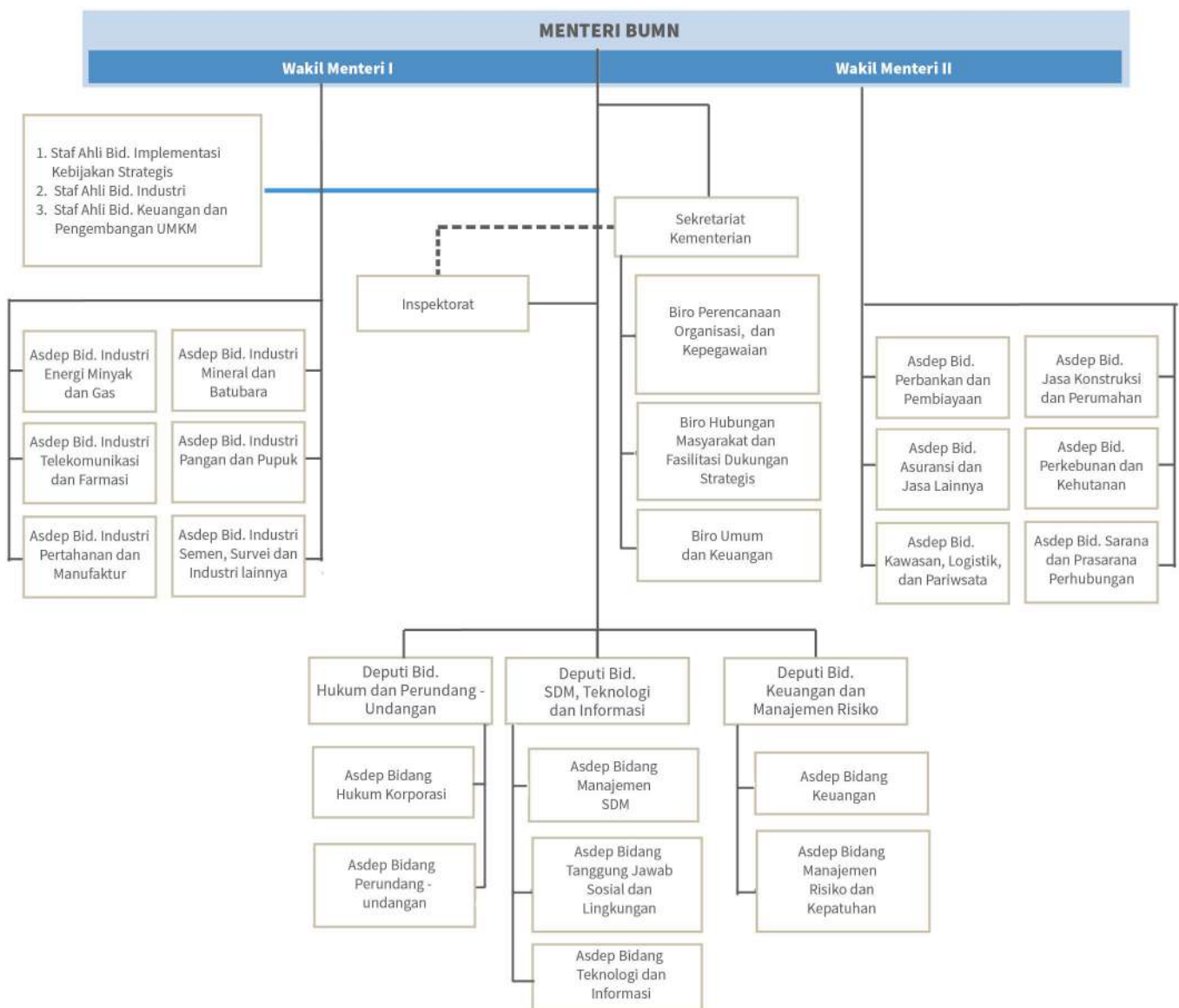
- Perumusan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia, teknologi, informasi dan tanggung jawab sosial BUMN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

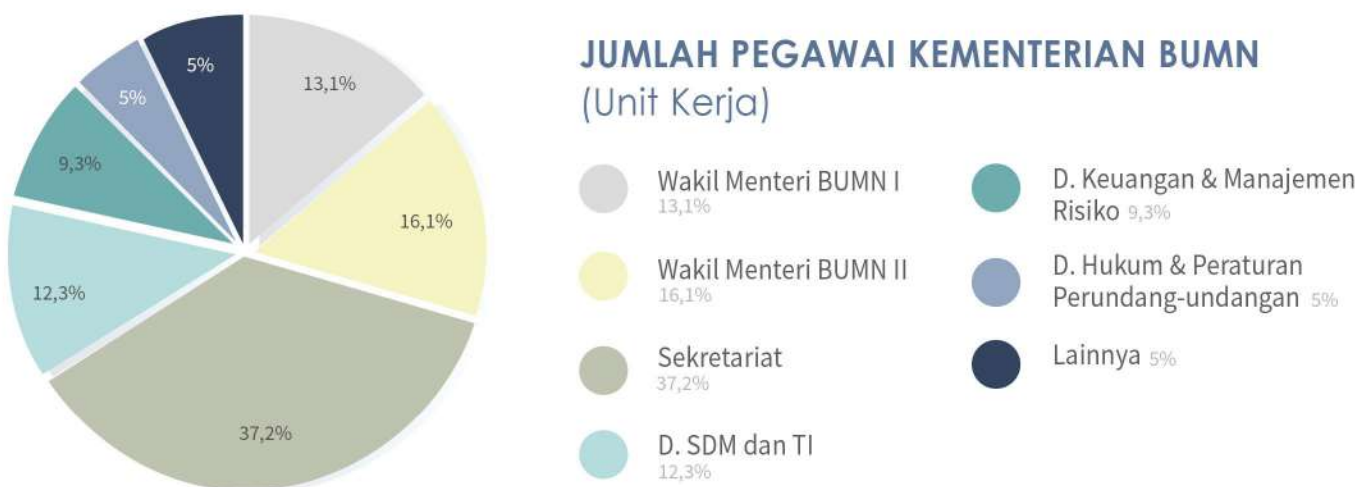
- Perumusan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan manajemen risiko BUMN;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN;
- Pengawasan atas kinerja, administratif, dan manajemen risiko BUMN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kementerian BUMN Tahun 2020

Struktur Organisasi baru Kementerian BUMN yang ditetapkan pada tahun 2020 merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi Kementerian BUMN dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan struktur organisasi baru tersebut diharapkan Kementerian BUMN dapat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan baik secara domestik maupun internasional.

Jumlah PNS Kementerian BUMN s.d. 31 Desember 2020 adalah sebanyak 398 orang. Pegawai Kementerian BUMN tersebut tersebar pada Unit Kerja Wakil Menteri BUMN dan Eselon I dengan komposisi sebagai berikut: Wakil Menteri BUMN I 60 orang, Wakil Menteri BUMN II 64 orang, Sekretariat (termasuk Inspektorat) 148 orang, Deputy Bidang SDM dan TI 49 orang, Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko 37 orang, Deputy Bidang Hukum dan PUU 20 orang, dan lainnya yang terdiri atas staf ahli dan pegawai yang diperbantukan pada instansi lain adalah 20 orang.



PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN BUMN

F



01 | ERICK THOHIR (MENTERI BUMN)

Lahir pada tanggal 30 Mei 1970. Diangkat sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Erick Thohir meraih *Bachelor of Arts* dari *Glendale University* pada tahun 1991 dan menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari *National University of California* pada tahun 1993.

Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Mahaka Media, Direktur ANTV, dan Ketua INASGOC Badan Pengelola Asian Games 2018.



02 | PAHALA NUGRAHA MANSURY (WAKIL MENTERI BUMN I)

Pahala Nugraha Mansury lahir di Bogor, 8 April 1971 umur 49 tahun. Sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN I, beliau merupakan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) sejak 2019. Bapak Pahala Mansury memiliki pengalaman profesional dan sejumlah jabatan penting di BUMN, antara lain pernah menjabat sebagai Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015 – 2017, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017 – 2018, Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2018 – 2019, serta pengalaman profesional di berbagai kantor konsultan internasional yang mendahului. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan terakhir MBA di *NYU Stern School of Business*.



03 | KARTIKA WIRJOATMODJO (WAKIL MENTERI BUMN II)

Lahir pada tanggal 18 Juli 1973. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN II sejak tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Kartika Wirjoatmodjo meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia (UI) dan menyelesaikan gelar *Master of Business* di *Rotterdam School of Management, Erasmus University* pada tahun 2001.

Karir sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN II antara lain adalah sebagai Presiden Direktur PT *Indonesia Infrastructure Finance* (2011-2013), Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015), Direktur *Finance & Strategy* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015-2016), dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016-2019).



04

SUSYANTO

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN

Lahir pada tanggal 4 Mei 1962. Ditunjuk sebagai Sekretaris Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020. Susyanto meraih gelar sarjana di Bidang Hukum Keperdataan dari Universitas Kediri pada tahun 1988 dan menyelesaikan Magister Hukum di STIE IBLAM pada tahun 2001. Karir beliau sebelum menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM (2013-2015), Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (2015-2018), dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM (2018-2020).

05

ALEX DENNI

DEPUTI BIDANG SDM DAN TI



Lahir pada tanggal 27 Desember 1968. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN sejak tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/TPA Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020.

Alex Denni meraih gelar sarjana di Bidang Manajemen Agro Industri dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990, menyelesaikan Magister Manajemen dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1997, dan Doktor dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Chief Transformation Officer* Dharma Satya Nusantara Group (2014-2016), *Chief Human Capital Officer* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2016-2018), dan *Direktur Human Capital dan Transformasi* PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (2018-2020).

06

CARLO B. TEWU

DEPUTI BIDANG HUKUM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Lahir pada tanggal 30 September 1962. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Carlo B. Tewu lulus Sespimpol pada tahun 1998, Pendidikan di Lemhanas pada tahun 2005, dan Sespati POLRI pada tahun 2008.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Direktur Tipidum Bareskrim Polri* (2015-2016), *Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi* (2016), *Deputy Bidang Koordinator Kamtibmas Kemenko Polhukam* (2016-2020).

07

NAWAL NELY

DEPUTI BIDANG KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO



Lahir pada tanggal 12 Mei 1973. Ditunjuk sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020.

Nawal Nely meraih gelar sarjana di Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan *Executive Master of Business Administration* di INSEAD pada tahun 2019.

Karir sebelum menjabat sebagai Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN antara lain adalah sebagai *Manager National Bank of Kuwait* (2005-2006), *Manager Ernst & Young – Doha* (2007-2008), *Senior Manager Ernts & Young Egypt – Cairo* (2009-2010), dan *Partner Ernts & Young Indonesia* (2010-2020).

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

SISTEMATIKA PENYAJIAN

- Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
 - Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
 - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian BUMN tahun 2020;
 - Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kementerian BUMN dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.
-



2

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memiliki peran strategis. Capaian atas RPJMN 2020-2024 akan menentukan apakah target pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dapat tercapai, antara lain yaitu pendapatan per kapita Indonesia yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*), kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, Kementerian BUMN telah merumuskan visi misi Kementerian dalam suatu Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2020-2024

VISI

“Mewujudkan Kementerian BUMN yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut sekaligus menjadi manifestasi komitmen Kementerian BUMN untuk mendukung agenda nasional.

A

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, terdapat lima hal utama yang menjadi fokus pembangunan selama 2020-2024, yaitu:

1

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung kerjasama industri dan talenta global.

2

Pembangunan Infrastruktur

Fokus utama pembangunan infrastruktur adalah melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada, khususnya dalam rangka menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3

Pembangunan Regulasi

Untuk mendorong pembangunan, segala bentuk regulasi yang menghambat iklim bisnis dan investasi perlu disederhanakan. Salah satu pendekatan yang dipakai adalah melalui penerbitan Omnibus Law. Secara khusus, terdapat dua Undang-Undang yang menjadi target Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, yaitu dengan cara memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5

Transformasi Ekonomi

Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan difokuskan untuk melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan arahan Presiden RI di atas, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham BUMN senantiasa mengoptimalkan pembinaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Renstra Kementerian BUMN merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dan merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran serta disusun berlandaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN.

MISI

Untuk mewujudkan visi serta agenda pembangunan tersebut di atas, Kementerian BUMN melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN;
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian BUMN;
- Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham; dan
- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian keempat tujuan tersebut, Kementerian BUMN kemudian menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian BUMN pada tahun 2020-2024. 9 (sembilan) Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang kemudian telah ditetapkan targetnya untuk 5 tahun kedepan (2020-2024) pada Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024.

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan. Perjanjian kinerja merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target 2020
Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional				
1	Menciptakan SDM yang unggul dan Profesional	1. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Skor	81 (Tinggi)
		2. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp. M/Org	Rp. 3,07M/Org
		3. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam BOD/BOC BUMN	%	9
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	3,0
		5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP
Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN				
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	6. Rasio BUMN Dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	70
		7. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN.	%	60
		8. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	80
4	Penguatan Kapasitas BUMN	9. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUMN/anak	33
		10. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	2,41
Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN				
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	11. Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri (jumlah negara)	Jumlah Negara	30
		12. Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	BUMN/ anak	10
6	BUMN Unggul di Kancan Global	13. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	4
		14. Pembentukan Holding BUMN	Holding	1
Memaksimalkan Kontribusi BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
7	Kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara (APBN)	15. Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBK)	Rp Triliun	354,42
8	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	16. Realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN	Rp Triliun	329,17
		17. Kontribusi BUMN pada pengembangan energi terbarukan	%	13
9	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	18. Net Profit	Rp Triliun	16,9
		19. Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.756

TABEL 2.1 Penetapan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN
2. Program Pembinaan BUMN

Rp220.856.115.000,00

Rp45.536.436.000,00

TOTAL ANGGARAN

Rp266.392.551.000,00



3

EVALUASI CAPAIAN KINERJA



EVALUASI KINERJA TAHUN 2020

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMN dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian BUMN yang mana juga merupakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada setiap periode Kementerian/Lembaga Pemerintah terus dituntut untuk meningkatkan kinerjanya walaupun dirasakan penuh tantangan. Namun demikian, segenap insan unit kerja Kementerian BUMN tetap berkomitmen membuktikan kinerjanya dengan mencapai target-target utama dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan baik. Upaya perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja lebih baik lagi untuk kedepannya.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan dengan fungsi kerja Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan cambuk untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja organisasi atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Output dari penilaian kinerja berupa NKO. Nilai capaian kinerja organisasi Kementerian BUMN pada tahun 2020 dihitung berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-217/MBU/10/2017 tentang Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian BUMN dengan sedikit modifikasi pada penilaian akhir dan pembobotannya.

Nilai Capaian Kinerja dihitung berdasarkan penilaian capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, pada Performance Report (PR) yang dilaporkan pada setiap triwulannya juga turut disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai capaian IKU. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan penilaian nilai kinerja organisasi, Kementerian BUMN memperoleh Nilai Kinerja Organisasi adalah **99,1 dengan kategori “Memuaskan”**. Tabel perhitungan tersebut dapat dilihat pada halaman selanjutnya:

NILAI KINERJA ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2020

Perseptif	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%realisasi 2020	Capaian IKU	Nilai SS	Nilai Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
Stakeholders	BUMN Unggul di Kancah Global	1. Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	4	4	100%	120	120	97	60%	58,2
		2. Pembentukan Holding BUMN	Holding	1	1	100%	120				
	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	3. Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNPB)	Rp Triliun	354,4	216	60,9%	60,9	60.9			
	Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Nasional	4. Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp Triliun	329,2	255,2	77,5%	77,5	98,9			
		5. Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	%	13	23,3	179,2%	120				
	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham	6. Net Profit	Rp Triliun	16,9	29,2	171,8%	120	108,4			
		7. Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	1.756	1.698	96,7%	96,7				
Internal Procces	Menciptakan Organisasi yang Kuat, Sehat, dan Akuntabel	8. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	3,0	3,3	110,7%	105	105	104,5	20%	20,9
		9. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	WTP	WTP	100%	105				
	Meningkatkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	10. Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	70	69	98,6%	98,6	102,9			
		11. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	60	100	167,7%	105				
		12. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi & Kebijakan	%	80	100	125%	105				
	Penguatan Kapasitas BUMN	13. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	BUMN	33	33	100%	105	105			
		14. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	%	2,41	2,4	100%	105				
	Meningkatnya Daya Saing BUMN	15. Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	Jumlah Negara	33	55	183,3%	105	105			
		16. Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readliness Index) BUMN/anak	BUMN/ anak	10	12	120%	105				
Learning and Growth	Menciptakan SDM yang Unggul dan Professional	17. Penungkatan Indeks Profesionalitas ASN	SKOR	81 (Tinggi)	81	100%	100	100	100	20%	20
		18. Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp M/Org	3,07	4,1	133,5%	100				
		19. Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	%	9	9,7	107,8%	100				
NILAI KINERJA ORGANISASI										100%	99,1
										MEMUASKAN	

TABEL 3.1 Nilai Kinerja Organisasi

Keterangan : *Capaian untuk penilaian 2019, karena 2020 belum selesai



m
BU
m
BU
m

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama 5 Tahun terakhir, Kementerian BUMN telah memberikan kontribusi aktif dalam pencapaian kinerja. Berikut ikhtisar Capaian Kinerja Kementerian BUMN 2020.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target 2020				Realisasi 2020			
			Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
Mewujudkan Kementerian BUMN sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional										
Menciptakan SDM yang unggul dan Profesional	1. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	SKOR	81	81	81	81	81	81	81	81
	2. Produktivitas tenaga kerja BUMN	Rp M/Org	n.a	n.a	3,07	3,07	n.a	n.a	3,6	4,1
	3. Rasio Keterwakilan Perempuan dalam BOD/BOC BUMN	%	n.a	n.a	n.a	9	n.a	n.a	n.a	9,7
Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	Indeks	n.a	n.a	n.a	3,0	n.a	n.a	n.a	3,32
	2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	Opini BPK	n.a	n.a	n.a	WTP	n.a	n.a	n.a	WTP
Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN										
Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	1. Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat	%	n.a	n.a	n.a	70	n.a	n.a	n.a	69
	2. Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	%	n.a	n.a	n.a	60	n.a	n.a	n.a	100
	3. Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	%	n.a	n.a	n.a	80	n.a	n.a	n.a	100
Penguatan Kapasitas BUMN	1. Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	%	n.a	n.a	n.a	33	n.a	n.a	n.a	33
	2. Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI, SLA, Hutang tidak produktif BUMN tidak sehat)	%	n.a	n.a	n.a	2,41	n.a	n.a	n.a	2,4
Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN										
Meningkatnya daya saing BUMN	1. Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri (Jumlah Negara)	Jumlah Negara	n.a	n.a	n.a	30	n.a	n.a	n.a	55
	2. Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	BUMN/ Anak	n.a	n.a	n.a	10	n.a	n.a	n.a	12
BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	BUMN	n.a	n.a	n.a	4	n.a	n.a	n.a	4
	Pembentukan Holding BUMN	Holding	n.a	n.a	n.a	1	n.a	n.a	n.a	1
Memaksimalkan Kontribusi BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan										
Kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara (APBN)	Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp Triliun	n.a	n.a	n.a	354,42	n.a	n.a	n.a	216
Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	1. Realisasi Belanja Modal (Capex) BUMN	Rp Triliun	n.a	n.a	n.a	329,71	n.a	n.a	n.a	255,2
	2. Kontribusi BUMN pada pengembangan energi baru terbarukan	%	n.a	n.a	n.a	13	n.a	n.a	n.a	23,3
Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	1. Net Profit	Rp Triliun	n.a	n.a	n.a	16,99	n.a	n.a	n.a	29,2
	2. Kapitalisasi Saham BUMN	Rp Triliun	n.a	n.a	n.a	1.756	n.a	n.a	n.a	1.698

TABEL 3.2 Capaian Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2020

Keterangan : *Capaian untuk penilaian 2019, karena 2020 belum selesai

MEWUJUDKAN KEMENTERIAN BUMN SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS BUMN YANG PROFESIONAL

1

SASARAN STRATEGIS 1

Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional

Sebagaimana suatu organisasi pada Pemerintahan, Kementerian BUMN terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian BUMN selaku pembina BUMN, agar BUMN tersebut menjadi *Agent of Development* sesuai dengan Prioritas Kementerian BUMN.

A Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Asesmen Indeks Penilaian Profesionalitas ASN	81	81	100%

TABEL 3.3 Capaian Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi pegawai ASN, instansi pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Indeks pengukuran di atas dipetakan secara sederhana berdasarkan jenis kelamin, jenis jabatan dan jenjang jabatan dan tingkat Pendidikan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN diukur secara mandiri atau self assessment menggunakan format dan standar pengukuran yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Indeks profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2020 mengukur data yang tercatat pada Januari 2020. Jumlah pegawai yang diukur sebanyak 365 orang, terdiri dari 222 orang laki laki dan 143 orang perempuan. Adapun nilai rata-rata pada setiap dimensi indeks profesionalitas ASN, yaitu dimensi kualifikasi sebesar 14,58, dimensi kompetensi sebesar 31,95, dimensi kinerja sebesar 28,78 dan dimensi disiplin sebesar 4,95. Adapun nilai keseluruhan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian BUMN pada tahun 2020 yaitu sebesar 81 (kategori sangat tinggi).

Tentunya tercapainya target Indeks Profesionalitas ASN tersebut tidak terlepas dari program-program serta pelatihan dan pendidikan yang telah diberikan kepada Pegawai Kementerian BUMN. selama Tahun 2020 yang dapat meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi maupun Displin Kementerian BUMN.

Berikut ulasan beberapa program unggulan yang telah yang telah dijalankan:

1

Webinar INSIGHT

(Informasi Isu Strategis dan Hangat Seputar Kementerian BUMN)

Program Webinar INSIGHT ini bertujuan untuk memberikan informasi-informasi yang strategis dan hangat seputar BUMN/Kementerian BUMN dari narasumber-narasumber yang mumpuni dan berpengalaman pada Pegawai, sehingga pegawai Kementerian BUMN mendapatkan wawasan tambahan seputar topik-topik yang disajikan.

Adapun beberapa daftar narasumber yang telah memberikan materi yaitu:

- Abdi Mustakim, Asisten Deputi Bidang Energi, Minyak dan Gas
- Aditya Dhanwantara, Asisten Deputi Bidang Industri Telekomunikasi dan Farmasi
- Susyanto, Sekretaris Kementerian BUMN
- Nawal Nely, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
- Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi

2

Program Beasiswa Pascasarjana Dalam dan Luar Negeri

Dalam rangka meningkatkan skill serta pengalaman Pegawainya, Kementerian BUMN membuka kesempatan yang sangat luas bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk dukungan program beasiswa dalam dan luar negeri. Selama tahun 2020, Kementerian BUMN telah menugaskan salah seorang pegawai untuk mengikuti Program Beasiswa Pascasarjana di *Melbourne University*, Australia.

Tak hanya di luar negeri, Kementerian BUMN juga sudah melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) bersama Universitas Indonesia dalam Program Beasiswa untuk Pascasarjana dan Sarjana Ekstensi. Selama tahun 2020, Kementerian BUMN telah menugaskan 3 (tiga) orang pegawai untuk melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia Jakarta.

3

Program Pendidikan dan Pelatihan Unggulan

Tak hanya melaksanakan program Webinar dan Beasiswa, di tahun 2020 Kementerian BUMN juga turut menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan (diklat) khusus Pegawai di Kementerian BUMN. Tercatat selama tahun 2020, pegawai yang telah mendapatkan minimal 20 jam pelajaran (JP) Diklat adalah 339 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) orang dengan total diklat yang telah diselenggarakan adalah 104 Diklat

Adapun beberapa Diklat ataupun Sertifikasi yang telah diberikan seperti:

- *Certified Risk Management Officer (CRMO)*
- *Certified Human Resources Executive Program (CHREP)*
- Manajemen Risiko Tersertifikasi Tingkat Profesional
- *Analyzing Data with Microsoft Power BI*
- Paket Pelatihan Keuangan Negara
- *Social and Economic Networks: Models and Analysis*
- *Certified Business Coach*
- dsb.

4

Penerapan LogBook dan Presentasi Virtual

Selama tahun 2020, dalam menjaga tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN pada masa pandemi COVID-19, Kementerian BUMN kemudian menerapkan sistem pengisian *Logbook* sebagai bentuk akuntabilitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disetiap hari. Tak hanya mewajibkan *logbook*, Kementerian BUMN juga menyediakan aplikasi presensi virtual bagi pegawai yang ditugaskan untuk bekerja dari rumah (*Work from Home*). Aplikasi tersebut kemudian dinamakan SIMO atau Simanis Mobile. Mekanisme presensi aplikasi SIMO ini cukup sederhana, namun tetap memperhatikan akuntabilitas kehadiran pegawainya. Aplikasi ini mengunci lokasi alamat domisili pegawai dengan titik koordinat sesuai GPS (*Global Positioning System*), sehingga apabila pegawai yang bersangkutan berada diluar posisi yang telah terdaftar, maka tidak akan dapat melakukan presensi virtual. Syarat selanjutnya dari presensi virtual tersebut adalah pegawai yang bersangkutan wajib melakukan swafoto yang kemudian diunggah pada aplikasi SIMO.

B Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Asesmen Indeks Penilaian Profesionalitas ASN	Rp3,07M/org	Rp4,1M/org	110,7%

TABEL 3.4 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja BUMN

Tenaga kerja merupakan salah satu elemen esensial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kelancaran proses produksi bergantung pada keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh sejauh mana suatu sistem mampu menunjang kegiatan produksi perusahaan. Produktivitas juga berkaitan erat dengan daya saing. Salah satu indikator BUMN yang berdaya saing tinggi ditunjukkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerjanya, dimana BUMN dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi menunjukkan kualitas SDM yang tinggi pula.

Pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja BUMN ditargetkan sebesar Rp3,07 Milyar/orang. Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi produktivitas tenaga kerja BUMN tercapai sebesar Rp4,1 Milyar/orang (sumber data: silaba)

Indikator Kinerja Utama	Trajectory Target				Realisasi			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
Produktivitas tenaga kerja BUMN	n.a	n.a	3,07	3,07	n.a	n.a	3,6	4,1

TABEL 3.5 Capaian Triwulan Produktivitas Tenaga Kerja

Pencapaian produktivitas tenaga kerja BUMN salah satunya didukung oleh program back to core business melalui streamlining Anak dan Cucu Perusahaan BUMN. Melalui program ini, terjadi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja BUMN Group. Di samping itu, peningkatan produktivitas kinerja BUMN juga diyakini akan semakin meningkat dengan adanya inisiatif pembentukan Global Shared Service (GSS) BUMN. GSS merupakan sebuah entitas yang akan menjalankan sistem pengelolaan fungsi supporting BUMN secara terpusat sehingga BUMN dapat fokus pada proses bisnis utama masing-masing BUMN. Dengan kolaborasi dan konsolidasi melalui GSS dapat terjadi cost reduction sebesar 20%.

C Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
(BOD/BOC Perempuan di BUMN / Total BOD/BOC di BUMN) x 100%	9%	9,7%	107,8%

TABEL 3.6 Capaian Rasio Keterwakilan Dalam BOD/BOC BUMN

Menurut studi dari International Finance Corporation, kehadiran perempuan dalam jajaran Direksi memiliki peran penting terhadap kesuksesan korporasi. Hal serupa dalam penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 2018 yang menjabarkan alasan posisi kepemimpinan perempuan menjadi hal yang penting. Beberapa alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Perempuan mampu menciptakan organisasi perusahaan menjadi sehat
- Perempuan mampu Mampu mendorong performa keuangan perusahaan
- Kepekaan perempuan mampu menghasilkan strategi perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen
- Kehadiran perempuan mampu menciptakan kepemimpinan yang egaliter
- Perempuan dapat mewarnai pengambilan keputusan dan tata kelola perusahaan serta mampu memberikan sudut pandang lain

Pada tahun 2020, Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 menargetkan rasio keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN adalah sebesar 9%. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat sejumlah 93 Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN perempuan dari total 960 Direksi dan Dewan Komisaris BUMN atau terealisasi sebesar 9,7%.

Indikator Kinerja Utama	Trajectory Target				Realisasi			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan	Tw I	Tw II	Tw III	Tahunan
Rasio keterwakilan perempuan dalam BOD/BOC BUMN	n.a	n.a	9%	9%	n.a	n.a	9,6%	9,7%

TABEL 3.7 Realisasi IKU Rasio Keterwakilan Perempuan per Triwulan

Sebagai langkah tindak lanjut pemenuhan target keterwakilan perempuan dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pada tahun 2020, Deputi SDM dan TI telah melakukan penjangkaran talenta melalui program Talent & Succession Management dimana setiap BUMN diminta untuk mengusulkan dan menominasikan sekurang-kurangnya 3 orang Top 20% BOD-1 kepada Kementerian BUMN. Sebanyak 1.429 talenta telah disampaikan dan telah teridentifikasi sejumlah 918 talenta BOD-1 yang memenuhi kualifikasi sebagai eligible talent. Dari 918 talenta tersebut, 124 diantaranya berjenis kelamin perempuan.

2

SASARAN STRATEGIS 2

Menciptakan Organisasi yang Kuat Sehat dan Akuntabel

A Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Hasil Asesmen SPBE	3,0	3,32	110,7%

TABEL 3.8 Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2020 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Keasdepan Teknologi dan Informasi melakukan evaluasi secara mandiri (self assesment) pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE di lingkungan internal Kementerian BUMN.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing

Nilai Indeks SPBE



Gambar 3.1 Nilai Indeks Aspek SPBE

ASPEK	NILAI
Indeks SPBE	3,32
Predikat SPBE	Baik
Domain Kebijakan SPBE	2,59
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,29
Kebijakan Layanan SPBE	3,9
Domain Tata Kelola	2,29
Kelembagaan	2
Strategi dan Perencanaan	2
Administrasi Pemerintahan	2,67
Domain Layanan SPBE	4
Administrasi Pemerintahan	4,29
Pelayanan Publik	3,5

TABEL 3.9 Nilai Indeks Aspek SPBE

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh counterpart (narasumber) melalui self assesment (evaluasi mandiri) yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung. Adapun target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga).
- Perolehan Nilai Indeks SPBE Kementerian BUMN pada tahun 2020 adalah 3,32 dengan Predikat Baik sehingga IKU Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE) mencapai 110,67% (dari target 3). Adapun dari nilai indeks tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.
- Diperlukan pembentukan Tim Pengarah SPBE/ IT Steering Committee untuk mengendalikan, mengarahkan, dan evaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian BUMN.
- Kementerian BUMN telah memiliki konsep kebijakan terkait penyelenggaraan SPBE yang tertuang dalam Draft Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN tahun 2018-2022, dan pada tahun 2020 sedang dilakukan revisi untuk kelanjutan dari kebijakan tersebut melalui penyusunan Draft Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN tahun 2021-2024.
- Kebijakan internal seperti kebijakan layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan dokumentasi dan informasi hukum serta layanan publik instansi pemerintah, sebaiknya dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal serta menerapkan manajemen perubahan.
- Penerapan proses bisnis yang terintegrasi perlu diperbaiki secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sistem/aplikasi di Kementerian BUMN.

- Layanan SPBE seperti layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan, layanan manajemen penganggaran, layanan manajemen keuangan, layanan manajemen kinerja, layanan pengadaan, layanan pengaduan publik hingga layanan publik Instansi Pemerintah seperti Silaba, ITMS, dan Portal PKBL sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di lingkungan Kementerian BUMN.
- Integrasi sistem aplikasi perlu dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi.

Diperlukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran TIK yang terintegrasi di unit pengelola TIK dan ditindaklanjuti sebagai masukan perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%

TABEL 3.10 Capaian Kualitas Laporan Keuangan

Secara umum Laporan Keuangan dibuat untuk mengetahui kinerja anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan tersebut disusun setiap tahunnya untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan selama 1 tahun anggaran. Laporan Keuangan Kementerian BUMN terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, Kementerian BUMN secara periodik diaudit oleh Auditor Independen Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun hasil dari audit tersebut, BPK RI akan mengeluarkan opini yang menunjukkan tingkat kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN. Tingkat Opini tersebut adalah dari yang terendah ke tertinggi adalah 1) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer); 2) Tidak Wajar (adversed); 3) Wajar dengan Pengecualian (qualified); dan 4) Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified). Pada Tahun 2020, dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Kementerian BUMN, Kementerian BUMN telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan adanya predikat opini tersebut, Kementerian BUMN telah mendapatkan Opini Hasil Pemeriksaan WTP selama 14 Tahun berturut-turut.

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KORPORATISASI BUMN

1

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi

A Rasio BUMN dengan Tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Silaba	70%	69%	98,6%

TABEL 3.11 Capaian Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat

Penilaian kinerja BUMN dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaidah penilaian perusahaan yang berlaku umum. Penilaian kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan dan jasa keuangan, kecuali BUMN Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-undang sendiri. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan tahun buku yang bersangkutan meliputi penilaian Aspek Keuangan, Operasional, dan Administrasi sesuai dengan SK Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. Berikut adalah tabel penilaian tingkat Kesehatan BUMN:

No	Nilai Tingkat Kesehatan	NILAI
1	≤ 30	Tidak Sehat
2	30 - 65	Kurang Sehat
3	65 - 85	Sehat (A)
4	80 - 95	Sehat (AA)
5	> 95	Sehat (AAA)

TABEL 3.12 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Selama periode tahun 2017-2019, kualitas penerapan tingkat kesehatan pada BUMN tercermin dalam pencapaian rata-rata skor tingkat kesehatan yang secara tren mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, dengan gambaran data sebagai berikut:

- Tahun 2017:
Capaian rata-rata nilai Tingkat kesehatan BUMN di tahun buku 2017 adalah 75,84. Nilai rata-rata Tingkat kesehatan ini diperoleh dari 105 BUMN. Adapun untuk jumlah BUMN dengan kategori sehat adalah sebanyak 82 BUMN.
- Tahun 2018:
Capaian rata-rata nilai Tingkat kesehatan BUMN di tahun buku 2018 adalah 77,18. Nilai rata-rata Tingkat kesehatan ini diperoleh dari data seluruh BUMN (tanpa memperhitungkan kelas BUMN) dari 103 BUMN yang telah menyampaikan laporan. Adapun untuk jumlah BUMN dengan kategori sehat adalah sebanyak 80 BUMN.
- Tahun 2019:
Capaian rata-rata nilai Tingkat kesehatan BUMN di tahun buku 2019 adalah 73,10. Nilai rata-rata Tingkat kesehatan ini diperoleh dari data seluruh BUMN (tanpa memperhitungkan kelas BUMN) dari 101 BUMN yang telah menyampaikan laporan. Adapun untuk jumlah BUMN dengan kategori sehat adalah sebanyak 69 BUMN.

Data capaian rata-rata nilai tingkat kesehatan BUMN tahun buku 2020 saat ini belum tersedia karena proses audit laporan keuangan BUMN sebagian besar masih dalam proses penyelesaian. Dalam rangka memperbaiki rasio tingkat kesehatan BUMN, Kementerian BUMN telah melaksanakan berbagai program penguatan fundamental BUMN baik keuangan maupun operasional antara lain melalui program transformasi keuangan, transformasi *culture* dan *human capital*, restrukturisasi keuangan, dan lain-lain.

B Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Self Assessment Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	60%	100%	167,7%

TABEL 3.13 Capaian Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundangundangan badan usaha milik negara, fungsi hukum memberikan peran dengan keikutsertaan dan keterlibatan dalam proses perancangan, penyusunan serta pengharmonisasian dalam setiap Peraturan Perundang-undangan terkait Badan Usaha Milik Negara.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan dan pembinaan BUMN yang dilakukan harmonisasi dalam bentuk:

- Undang-Undang/Rancangan Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden/Rancangan Peraturan Presiden;
- Keputusan Presiden/Rancangan Keputusan Presiden;
- Instruksi Presiden/Rancangan Instruksi Presiden; dan/atau
- Peraturan Menteri (K/L)/ Rancangan Peraturan Menteri (K/L).

Selama tahun 2020 harmonisasi regulasi yang telah dilakukan sebanyak 36 Peraturan, termasuk diantaranya 10 telah diundangkan dan sisanya masih dalam proses harmonisasi dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.2 Grafik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Nilai Tingkat Kesehatan	Status
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Selesai
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Selesai
3	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara	Proses pembahasan (Prolegnas 2020-2024)
4	Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
5	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
6	Rancangan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
7	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi	Selesai
8	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi	Selesai
9	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Selesai
10	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)	Selesai
11	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	Poses Finalisasi
12	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
13	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang - Undang Minerba	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
14	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Proyek Putar Kunci	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
15	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
16	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
17	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
18	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19	Selesai
19	Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang KPCPEN	Selesai
20	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan PT PPA untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan RS di Biak, UGM, Sugiri	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
22	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Industri Terpadu Batang	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
23	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama Pemerintah dengan BUMN Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga

No	Nilai Tingkat Kesehatan	Status
24	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penugasan Perum Perumnas	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
25	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PLN	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
26	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
27	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Perpres PSO PT KAI	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
28	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
29	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN	Selesai
30	Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Komite Privatisasi Persero	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
31	Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
32	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional	Selesai
33	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Vaksin	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
34	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
35	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga
36	Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Kepesertaan dan Simpanan Tapera	Proses pembahasan tingkat Kementerian/Lembaga

TABEL 3.14 Daftar Peraturan Perundang-Undangan yang diharmonisasi

Pembentukan LPI merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mencapai maksud dan tujuan investasi Pemerintah yang meliputi yaitu:

- Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya;
- Memberikan sumbangan bagi perkembangan
- Perekonomian nasional pada umumnya dan
- Penerimaan negara pada khususnya;
- Memperoleh keuntungan; dan/atau
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum termasuk namun tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.

Pembahasan pembentukan LPI dilakukan secara intensif antara Pemerintah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan) dengan DPR dan telah disepakati pendiriannya berdasarkan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam rangka menindaklanjuti pendiriannya telah diundangkan PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI.

C | Tingkat Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi & Kebijakan

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Self Assessment Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	80%	100%	125%

TABEL 3.15 Capaian Tingkatan Kepatuhan BUMN dalam Menindaklanjuti Regulasi & Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan peran sebagai *agent of development* dan *value creation*, Kementerian BUMN perlu mendorong BUMN agar menciptakan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. BUMN diharapkan juga berperan sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Dengan strategi yang mengedepankan inovasi dan didukung regulasi/kebijakan yang tepat, BUMN diharapkan dapat menjadi *sector leader* bukan hanya di pasar domestik namun juga di pasar internasional/regional

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundangundangan badan usaha milik negara dilaksanakan oleh Kedeputian Hukum dan Perundang-undangan. Proses perancangan, penyusunan, serta pengharmonisasian dalam setiap peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan seluruh stakeholder untuk menghasilkan regulasi/kebijakan yang dapat diaplikasikan dengan baik. Pada tahun 2020 dapat direalisasikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) peraturan terkait BUMN, dukungan aspek hukum atas pembentukan *Holding* BUMN dan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.

Mengoptimalkan potensi yang ada dan mendorong BUMN agar menjadi sector leader di pasar domestik, regional, maupun global bukanlah upaya yang mudah. Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian BUMN.

Kepatuhan BUMN terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu prasyarat sebagai suatu korporasi yang baik. BUMN harus selalu mengikuti perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sehingga diperlukan suatu fungsi di BUMN yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usahanya dan memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti regulasi peraturan dan kebijakan sepanjang tahun 2020 cukup baik. Dalam laporan tahunan setiap BUMN telah dinyatakan bahwa korporasi telah mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan aktivitas usaha korporasi.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan BUMN terhadap kebijakan dan regulasi, Kementerian BUMN telah membentuk Tim Pengawal Tata kelola BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-105/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang keanggotaannya berasal dari unsur Kementerian BUMN, unsur BUMN, unsur Kepolisian Republik Indonesia, Unsur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keikutsertaan dari berbagai unsur dimaksud diharapkan mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang ada di BUMN secara mendalam.

Maksud dan tujuan pembentukan Tim Pengawal Tata Kelola BUMN adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan di lingkungan BUMN dan mencegah tindakan yang menyimpang dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan BUMN. Sepanjang tahun 2020, telah dilakukan 32 (tiga puluh dua) pendalaman atas dugaan penyimpangan tata kelola BUMN dan sengketa BUMN.

Pada akhirnya, kepatuhan BUMN menindaklanjuti peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian BUMN merupakan kontekstual dari BUMN-BUMN yang telah mendapat amanah untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemajuan perekonomian bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguatan Kapasitas BUMN

A Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah Melakukan IPO

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Silaba	33 BUMN	33 BUMN	100%

TABEL 3.16 Capaian Jumlah BUMN/anak yang melakukan IPO

Penawaran umum atau initial public offering (IPO) merupakan salah satu bagian privatisasi dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Selain IPO, penjualan saham berdasarkan pasar modal berupa penawaran umum lanjutan, penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas, penjualan kepada mitra strategis bagi Persero yang telah terdaftar di bursa, dan cara lain sepanjang memenuhi ketentuan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Privatisasi dilaksanakan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Privatisasi dapat dilakukan kepada Persero yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: industri/sektor usahanya kompetitif atau industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah. Sedangkan, kriteria Persero yang tidak dapat dilakukan privatisasi yakni Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Selama tahun 2020, Kementerian menargetkan bahwa jumlah total BUMN/anak yang telah melakukan IPO adalah 33 BUMN/anak (tidak ada peningkatan jumlah dari tahun 2019). Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Kementerian BUMN fokus dalam memperkuat fundamental keuangan dan operasional baik BUMN maupun anak, baik yang telah IPO maupun tidak agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan mampu bersaing dengan kompetitor Nasional dan Global.

B | **Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUMN yang tidak sehat**

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Silaba	2,41%	2,41%	100%

TABEL 3.17 Capaian Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN

Dalam rangka memperkuat struktur modal BUMN ke depan, diperlukan adanya restrukturisasi terhadap pinjaman RDI/SLA BUMN. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, Kementerian BUMN mengusulkan konversi utang pokok RDI/SLA menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penghapusan utang non pokok RDI/SLA. Restrukturisasi terhadap utang RDI/SLA ini sejalan dengan program restrukturisasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian BUMN.

Menteri BUMN telah menerbitkan surat nomor SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 Perihal Usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA. 2021 yang didalamnya mengusulkan konversi atas utang pokok RDI/SLA menjadi PMN serta penghapusan utang non pokok pada 18 BUMN. Selanjutnya, BUMN mengirimkan surat usulan restrukturisasi serta dokumen persyaratan sesuai yang telah diamanahkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Pada tahun 2020, telah dilaksanakan *Cut Off Date* atas saldo utang RDI/SLA yang akan direstrukturisasi. Direktorat Sistem Manajemen Investasi juga telah mengadakan Rapat Pleno bersama BUMN terkait, Kedeputan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Konsultan Keuangan, dan Konsultan Hukum guna membahas Rencana Perbaikan Kinerja masing-masing BUMN. Selanjutnya, BUMN memperbaiki Rencana Perbaikan Kinerja, *Financial Due Diligence*, dan *Legal Due Diligence* sesuai hasil pembahasan Rapat Pleno dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

**Daftar BUMN yang Belum Mendapat Persetujuan
Restrukturisasi Utang RDI/SLA dari Menteri Keuangan**

No	BUMN	Surat Rekomendasi	Usulan Penyelesaian
1	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	S-296/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	S-297/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Penghapusan Utang Non Pokok
3	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	S-298/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
4	PT Pindad (Persero)	S-299/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
5	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	S-300/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
6	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT PG Rajawali II	S-301/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
7	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	S-302/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
8	PT Pertani (Persero)	S-303/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
9	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	S-304/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
10	PT Sang Hyang Seri (Persero)	S-305/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
11	Perum PPD	S-306/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
12	PT Barata Indonesia (Persero)	S-307/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
13	PT Perikanan Nusantara (Persero)	S-308/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Penghapusan Utang Non Pokok
14	PT Amarta Karya (Persero)	S-309/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Penghapusan Utang Non Pokok
15	PT Garam (Persero)	S-310/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
16	Perum Perumnas	S-311/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Penghapusan Utang Non Pokok
17	PT PAL Indonesia (Persero)	S-312/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Utang Pokok dikonversi menjadi PMN - Penghapusan Utang Non Pokok
18	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	S-313/MBU/Wk1/10/2020/tanggal 8 Oktober 2020	- Penghapusan Utang Non Pokok

TABEL 3.18 Daftar BUMN yang Belum Mendapat Persetujuan Restrukturisasi

Total Saldo Utang RDI/SLA dan Utang Tidak Produktif dari BUMN yang Diusulkan Untuk Direstrukturasikan

Dalam Miliar Rupiah

No	Nama BUMN	RDI/SLA -Pokok	RDI/SLA -Non Pokok	Eks BPPN -Pokok	Eks BPPN -Non Pokok	TOTAL
1	PT Amarta Karya (Persero)	-	10,2	-	-	10,2
2	Perum PPD	-	24,1	-	-	24,1
3	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	3,8	29,1	-	-	32,8
4	PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero)	-	35,1	-	-	35,1
5	Perum Perumnas	-	47,9	-	-	47,9
6	PT Perikanan Nusantara (Persero)	-	59,6	-	-	59,6
7	PT Garam (Persero)	7,1	63,6	-	-	70,6
8	PT Barata Indonesia (Persero)	9,7	24,1	-	-	74,9
9	PT Sang Hyang Seri (Persero)	66,0	182,2	-	-	248,2
10	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	186,1	105,3	-	-	291,5
11	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	90,8	247,6	-	-	338,4
12	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	138,5	138,1	587,4	22,3	886,3
13	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	983,1	-	-	983,1
14	PT Pertani (Persero)	22,9	134,7	-	-	157,6
15	PT PAL Indonesia (Persero)	26,4	10,2	-	-	157,9
16	PT Pindad (Persero)	239,1	24,1	-	-	269,4
17	PT Dirgantara Indonesia	-	-	382,6	-	382,6
18	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	59,7	1.130,1	-	-	1.189,0
19	PT Dok dan Perlengkapan Kodja Bahari (Persero)	89,2	433,6	1.250,0	54,2	1.827,0
SUBTOTAL		939,4	3851,3	2.220,0	76,6	7.087,2
Daftar BUMN yang Sudah Mendapat Persetujuan Restrukturisasi Utang dari Menteri Keuangan dan Telah Masuk ke Postur APBN-P 2020						
1	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	268,0	-	-	-	268,0
2	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	3.762,8	-	-	-	3.762,8
SUBTOTAL		4.030,8	-	-	-	4.030,8
TOTAL KESELURUHAN		4.970,2	3851,3	2.220,0	76,6	11.118,0

TABEL 3.19 Total Saldo Utang RDI/SLA dan Utang Tidak Produktif dari BUMN

Khusus untuk usulan restrukturisasi utang RDI/SLA pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT PANN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan dimasukkan pada Postur APBN-P Tahun Anggaran 2020. Kedepan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengawal progres penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah hingga proses pencairannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2020, restrukturisasi utang RDI/SLA pada PT Bahana PUI (Persero) telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan skema konversi Utang Pokok sebesar Rp268 Milyar menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun restrukturisasi utang RDI/SLA pada PT PANN belum berhasil dilakukan hingga saat ini karena Kementerian Keuangan mengirimkan surat S-1223/MK.06/2020 tanggal 31 Desember 2020 Perihal Permintaan Penjelasan Rencana Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) Ke Depan dan belum ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah yang mengakomodir persetujuan terhadap restrukturisasi utang PT PANN belum dapat diterbitkan. Maka dari itu, indikator kinerja "Penyelesaian restrukturisasi hutang BUMN (RDI, SLA, hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)" hanya mencapai 2,41% atau belum mencapai target.

MENINGKATKAN KEUNGGULAN DAYA SAING BUMN

1

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Daya Saing BUMN

A Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Jumlah Negara Tujuan Ekspor minimal USD 10.000	30 Negara	55 Negara	183,3 %

TABEL 3.20 Capaian Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri

Ekspor yang dilakukan BUMN merupakan salah satu wujud dari BUMN *Go Global* yang menunjukkan daya saing di pasar dunia. Potensi Ekspor BUMN yang cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah negara tujuan ekspor BUMN dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 dengan nilai diatas USD10.000 seperti yang tersaji dalam tabel 3.19 Data Ekspor BUMN tahun 2018 hingga tahun 2020. Negara tujuan ekspor BUMN tidak hanya melingkupi daerah di asia tenggara namun sudah mencapai negara di benua Amerika, Australia, Afrika dan Eropa. Ekspor BUMN terdiri dari beberapa sektor yaitu konstruksi, manufaktur, migas dan energi, minerba, pangan dan pupuk, perkebunan, serta pertahanan

No	Nilai Tingkat Kesehatan	NILAI
1	2018	60
2	2019	54
3	2020	55

TABEL 3.21 Data Ekspor BUMN tahun 2018-2020

Komoditas ekspor utama dan memiliki nilai ekspor terbesar ada pada sektor migas dan energi. BUMN pada sektor migas dan energi yaitu PT Pertamina dan anak perusahaannya memiliki komoditas ekspor andalan berupa minyak mentah, produk minyak, dan gas bumi, sedangkan pada sektor minerba ekspor berupa hasil tambang seperti alumina, batu bara, nikel dan lain – lain. Selanjutnya pada sektor konstruksi komoditas ekspor BUMN adalah proyek konstruksi, jasa konstruksi, semen, dan clinker. Pada sektor pangan dan pupuk, PT Perikanan Nusantara, Perum Perindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memiliki komoditas ekspor yang terdiri dari hasil laut dan holtikultura. Komoditas lain yang diekspor oleh BUMN seperti *sparepart* kereta oleh PT Industri Kereta Api, *aerostructure* oleh PT Dirgantara Indonesia, dan peralatan pertahanan oleh PT Pindad.

B Perbaikan Level INDI 4.0 (*Indonesia Industry 4.0 Readliness Index*) BUMN/anak

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Assessment INDI pada BUMN/anak	10 BUMN/anak	12 BUMN/anak	120%

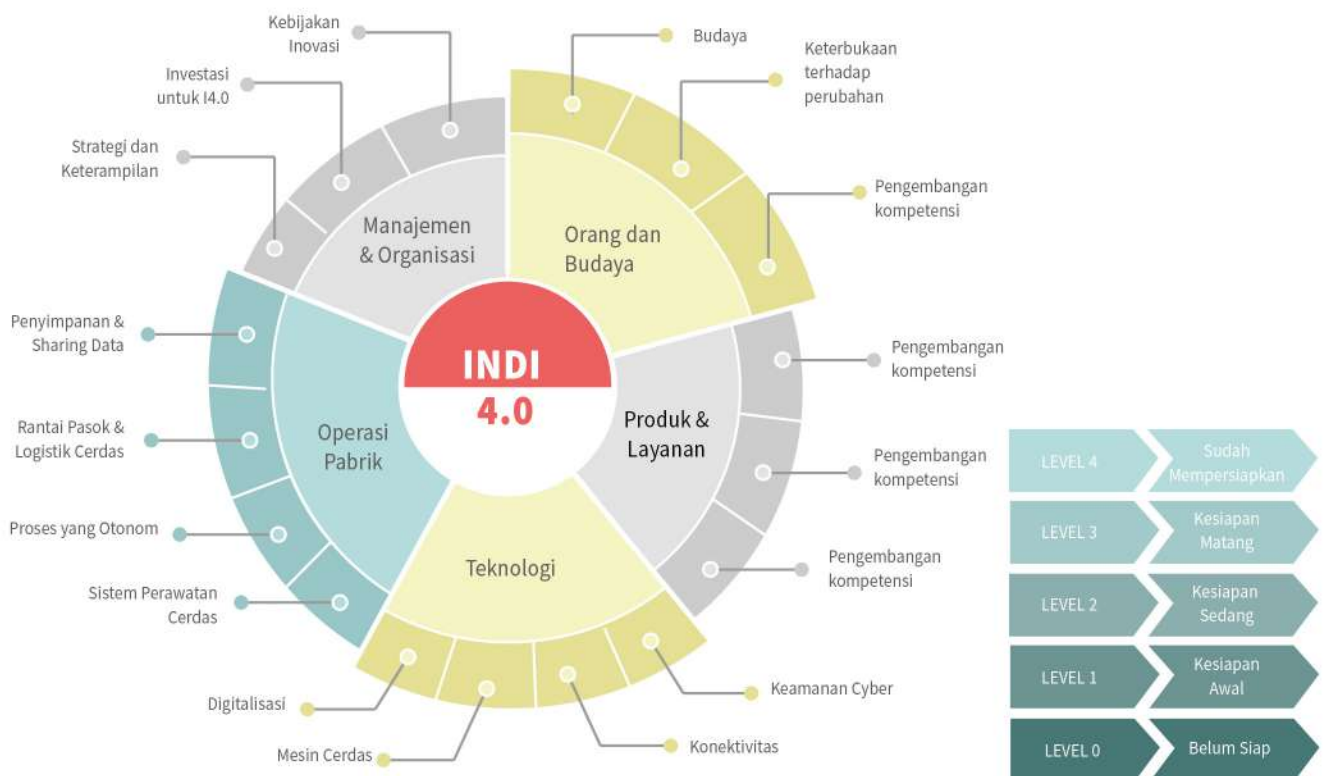
TABEL 3.22 Capaian Perbaikan level INDI 4.0 BUMN/anak

Pada era disrupsi teknologi dan adanya revolusi industri perlu dilakukannya pemetaan kesiapan BUMN dengan melakukan *assessment* INDI 4.0 dimana kita dapat mengukur tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0

Tujuan dilakukannya *assessment* INDI 4.0 untuk BUMN adalah sebagai berikut:



Metode pelaksanaan *assessment* INDI 4.0, yaitu melalui survei online yang mengacu pada 5 pilar yaitu manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi dan operasi pabrik, yang selanjutnya dilakukan validasi hasil survei secara online. Berikut *framework assessment* INDI 4.0 yang digunakan:



Gambar 3.3 Framework Assesment INDI 4.0 BUMN/anak

Adapun secara garis besar, berdasarkan *framework* diatas hasil *assessment* INDI 4.0 BUMN pada tahun 2020, berada pada level kesiapan Sedang, dengan daftar BUMN asesi sebagai berikut:

No	BUMN
1	PT Hutama Karya (Persero)
2	PT Pupuk Indonesia (Persero)
3	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
5	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
6	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7	PT Pertamina (Persero)
8	PT Angkasa Pura II (Persero)
9	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
11	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
12	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

TABEL 3.23 Daftar BUMN Asesi

Secara keseluruhan, dari hasil *assessment* INDI 4.0 pada tahun 2020 dapat disimpulkan orientasi pilihan strategi (*as-is*) pada 12 BUMN adalah sebagai berikut:

No	ASPEK	Orientasi Strategi
1	Arah Kekuatan	<i>Stability & focused</i>
2	Orientasi dominan kekuatannya	<i>Focused low cost strategy</i>
3	Fokus tindakan	<i>Business & HR roles, critical managerial competencies and culture di dorong agar selaras dengan strateginya</i>

TABEL 3.24 Orientasi Pilihan Strategis dari 12 BUMN

Dalam rangka peningkatan kesiapan BUMN dalam menghadapi era disrupsi teknologi dan revolusi industri, Kementerian BUMN akan melaksanakan program peningkatan INDI 4.0 antara lain sebagai berikut.

- Kementerian BUMN telah meminta seluruh BUMN untuk melakukan kegiatan asesmen INDI 4.0. Hal ini tertuang dalam Surat Aspirasi Pemegang Saham, sehingga diharapkan telah menjadi KPI seluruh BUMN.
- Kementerian BUMN telah menyusun MOU antara Menteri BUMN dengan Menteri Perindustrian terkait kerjasama dalam hal *assessment* INDI 4.0 BUMN sehingga diharapkan dengan MOU tersebut akan mempermudah BUMN dalam melakukan *assessment* maupun pendampingan atas hasil *assessment* tersebut oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan skor *as is* dan BUMN akan membuat *roadmap* pemenuhan gap berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi tersebut.

BUMN Unggul di Kancanah Global

A Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Jumlah BUMN yang masuk Peringkat Dunia seperti Fortune 500 & Forbes 2000	4 BUMN	4 BUMN	100%

TABEL 3.25 Capaian Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah *Fortune* yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan total pendapatan yang tertuang di dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun fiskal sebelumnya. Selain *Global 500*, *Forbes* telah merilis daftar 2000 perusahaan *public global* terbesar di dunia

Adapun rincian BUMN yang masuk ke dalam kedua peringkat tersebut selama 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Kategori	BUMN	Peringkat		
		2018	2019	2020
Global Fortune 500	PT Pertamina (Persero)	253	175	-
Forbes 2000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	515	363	347
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	489	481	495
	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	720	747	708
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	903	835	1053

TABEL 3.26 Daftar BUMN yang Masuk Peringkat Global Tahun 2018-2020

B Pembentukan Holding BUMN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Jumlah Holding yang Terbentuk	1 Holding	1 Holding	100%

TABEL 3.27 Capaian Pembentukan Holding BUMN

Pembentukan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam mengerjakan konsolidasi yang dapat memberikan dampak percepatan dan penguatan daya saing terutama di sektor asuransi dan penjaminan. Susunan keanggotaan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai induk *holding* dan PT Jasa Raharja, PT Asuransi Kredit Indonesia,

PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia sebagai anggota *holding*. Ekosistem keuangan terutama sektor asuransi dan penjaminan memegang peranan penting dalam hal penguatan stabilitas keuangan, baik dari sisi *supply* maupun *demand*, dengan tingkat kompetisi yang cukup tinggi mempertimbangkan potensi sektor secara nasional. Oleh karena itu, pembentukan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan merupakan hal yang substansial untuk mendorong roda perekonomian di Indonesia.

Secara garis besar, pembentukan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan dapat menjawab beberapa tantangan nasional melalui strategi-strategi sebagaimana berikut:

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi antar BUMN melalui inisiatif *cross selling*, *product bundling* dan inovasi produk baru.
- Penguatan permodalan intra grup untuk memperkuat penetrasi dan akses.
- Meningkatkan inklusi dan literasi asuransi melalui integrasi jalur distribusi dan penetrasi ke masyarakat.
- Pengaturan *gameplay* untuk menekan kanibalisasi antar anggota *Holding*.
- Inovasi dan Digitalisasi melalui *InsureTech* sebagai *aggregator* dan akselerator.
- Peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM melalui strategi pelatihan yang terstruktur dan terkoordinasi lebih baik.
- Pertumbuhan anorganik dengan akuisisi asuransi jiwa di Indonesia dan perusahaan di luar negeri untuk memperbesar pangsa pasar.

Dari hasil proyeksi keuangan, pembentukan *Holding* berpotensi memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dari aspek dividen dan pajak selama tahun 2019-2028 sebesar Rp 7,76 triliun (secara kumulatif). Pembentukan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor terkait, melalui kerjasama *distribution channel*, penetrasi ke daerah dan inovasi produk baru. Dengan pembentukan *Holding*, jumlah nasabah BUMN Asuransi diproyeksikan akan 20,89 juta orang, meningkat ~2,5x dibandingkan proyeksi jika tidak dibentuk *Holding* pada tahun 2028. Sedangkan tingkat inklusi berpotensi mencapai 6,95% hanya dari porsi anggota *Holding* saja dibandingkan tanpa *Holding* yang mencapai 2,74% di tahun 2028, dengan pertumbuhan nasabah berasal dari *product bundling*, *sinergi distribution channel*, serta pertumbuhan anorganik melalui akuisisi anak perusahaan BUMN lain yang bergerak di dalam bidang asuransi jiwa dan umum.

Dengan mempertimbangkan potensi dari sisi keuangan, ditambah dengan strategi dan objektif dari pembentukan *Holding*, manfaat yang dapat diberikan oleh *Holding* cukup kritikal terhadap penguatan daya saing nasional dan inklusi keuangan yang secara signifikan akan berdampak pada para pemegang kepentingannya.

MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI BUMN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

1

A

SASARAN STRATEGIS 1

Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara

Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Internal Kementerian BUMN	Rp354,42 Triliun	Rp216,00 Triliun	60,9%

TABEL 3.28 Capaian Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

BUMN diharapkan dapat memberikan wujud nyata kontribusi dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dividen, pajak, dan PNBP lainnya. Setiap tahunnya, kontribusi tersebut diharapkan akan terus meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang mencapai 2,85%. Sedangkan pada tahun 2020, adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi kinerja keuangan sebagian besar BUMN menyebabkan penurunan kinerja BUMN dan berdampak pada kontribusi terhadap penerimaan negara.

Adapun rincian kontribusi BUMN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

(dalam Triliun rupiah)

No	Nilai Tingkat Kesehatan	2018	2019	2020
1	Dividen	44	50	44
2	Pajak	245	284	90
3	PNBP Lainnya	167	135	82
TOTAL		456	469	216

TABEL 3.29 Rincian Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)

Realisasi dividen TA 2018 sebesar Rp44 triliun dan meningkat 12,3% pada TA 2019 menjadi Rp50 miliar. Sedangkan pada TA 2020, terjadi penurunan 11,8% menjadi Rp44 miliar. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kebutuhan *cash-flow* sebagian besar BUMN. Namun demikian, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi dividen BUMN di bawah Kementerian BUMN sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam UU APBN.

Adapun gambaran 10 BUMN sebagai kontributor dividen terbesar (lebih dari 80%) adalah sebagai berikut:

(dalam Triliun rupiah)



Gambar 3.4 10 BUMN dengan Kontribusi Terbesar Kepada Negara

Kementerian BUMN secara konsisten terus berusaha melakukan pembinaan terhadap BUMN agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi Negara baik dalam bentuk dividen, pajak dan PNPB lainnya. Arahan kepada BUMN untuk memperkuat fundamental Perusahaan, melakukan ekspansi bisnis secara efektif dan efisiensi serta berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran sebagai *agent of development* dan seterusnya senantiasa diberikan kepada BUMN di bawah binaan Kementerian BUMN.

2

SASARAN STRATEGIS 2

Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional

A Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Internal Kementerian BUMN	Rp329,17 Triliun	Rp255,2 Triliun	77,5%

TABEL 3.30 Capaian Realisasi Belanja Modal (CAPEX)

(angka dalam Rp Triliun)

CAPEX	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Infrastruktur	147,9	143,7	165,0	268,5	298,7	285,8	209,0
Non Infrastruktur	74,7	76,9	100,7	46,1	149,3	80,5	46,2
Total Capex	222,6	220,6	265,7	314,6	448,1	366,3	255,2

*) Data Silaba per 8 Februari 2021, status laporan BUMN unaudited dan prognosa

TABEL 3.31 Rincian CAPEX BUMN 7 Tahun Terakhir

Data yang didapatkan menunjukkan bahwa peningkatan CAPEX BUMN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan CAPEX didominasi oleh CAPEX Infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN. Seperti yang diketahui, bahwa 5 tahun terakhir, BUMN banyak diberikan penugasan-penugasan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah sebagai pemegang saham, antara lain Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Tol Trans Jawa dan lainnya. Pada tahun 2020 sendiri, akibat pandemic COVID-19, beberapa BUMN melakukan penundaan CAPEX sehingga nilai CAPEX menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, realisasi Capex BUMN secara total adalah sebesar Rp255,2 Triliun (pembulatan), turun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 366,3 Triliun.

B Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Tambahan Kapasitas Terpasang oleh BUMN/ Tambahan Kapasitas Terpasang Nasional	13%	23,3%	179,2%

TABEL 3.32 Capaian Kontribusi BUMN pada Pengembangan EBT

PT PERTAMINA (PERSERO) 4MW

Tambahan Kapasitas terpasang ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dipasang di RU IV Cilacap, RU II Dumai, Kawasan Ekonomi Khusus Sei mangkei dan 50 SPBU yang tersebar di Jabotabek, Jabar, Jateng dan Jatim.

PT PLN (PERSERO) 156 MW

Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit EBT PT PLN s.d Desember 2020 sebesar 7.946 MW, naik 2% dari tahun sebelumnya sebesar 7.790 MW, dapat disimpulkan bahwa tambahan kapasitas terpasang adalah 156 MW. Sehingga secara keseluruhan bauran EBT pada PT PLN sebesar 13,07%. Adapun pencapaian bauran EBT selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Implementasi co-firing PLTU pada 6 Lokasi Pembangkit • PLTU Paiton • PLTU Jeranjang • PLTU Sanggau • PLTU Pacitan • PLTU Suralaya 1-4 • PLTU Ketapang	3 Buah PPA ditandatangani • PLTS Apung Cirata 1 45 MWp • PLTM Bayu 3,6 MW • PLTM Sumber Arum 3 MW	5 buah Tol terbit (dalam proses persetujuan oleh MESDM) • PLTS Bali Barat 25 MWp • PLTS Bali Timur 25 MWp • 3 lokasi PLTM ex PUPR total 6,95MWo
--	---	---

Total Kapasitas Tambahan Terpasang EBT BUMN Adalah 160 MW. Sedangkan Total Kapasitas Tambahan Terpasang EBT secara Nasional yang tertuang pada RPJMN adalah 686,5 MW. Sehingga kontribusi EBT BUMN adalah 23,3% untuk Tahun 2020.

3

SASARAN STRATEGIS 3

Kontribusi BUMN dalam Peningkatan Value BUMN untuk Pemegang Saham

A Net Profit

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Internal Kementerian BUMN	Rp16,99 Triliun	Rp29,16 Triliun	171,8%

TABEL 3.33 Capaian Net Profit

(angka dalam Rp Triliun)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Net Profit	148,237	149,766	176,175	186,395	185,667	165,370	29,159

*) Data Silaba per 8 Februari 2021, status laporan BUMN unaudited dan prognosa

TABEL 3.34 Rincian Net Profit 7 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu 7 tahun kebelakang, terjadi pertumbuhan laba bersih BUMN dari tahun ke tahun. Peningkatan laba bersih menunjukkan pertumbuhan bisnis oleh BUMN-BUMN. Namun, pada tahun 2020 penurunan terjadi pada laba bersih BUMN yang sangat drastis yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Penurunan laba bersih diakibatkan antara lain karena turunnya pendapatan BUMN yang sangat tajam. Hampir seluruh kluster merasakan dampak tersebut. Kluster yang menerima dampak terbesar adalah Kluster Pariwisata dan Pendukung. Pada 3 Kuartal pertama tahun 2020, kluster pariwisata dan pendukung mengalami penurunan pendapatan lebih dari 80%. Selain itu, turunnya laba bersih BUMN juga diakibatkan oleh penerapan PSAK-PSAK baru pada tahun 2020. Sementara itu, kluster yang cenderung tidak mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19 adalah Kluster Kesehatan, Pangan dan Pupuk serta Telekomunikasi.

B Kapitalisasi Saham BUMN

Rumus Indikator Kerja	Target	Realisasi	Persen Capaian
Data Internal Kementerian BUMN	Rp1.756 Triliun	Rp1.698,4 Triliun	96,7%

TABEL 3.35 Capaian Kapitalisasi Saham BUMN

BUMN telah berkontribusi besar di bidang pasar modal dengan kontribusi kapitalisasi pasar pada tahun 2020 mencapai 24,37 persen dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah BUMN yang mencatatkan sahamnya di BEI sekitar 5 persen yaitu 33 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMN dan 19 anak perusahaan BUMN dari total Emiten di BEI yang mencapai 713 perusahaan. Selain itu, terdapat 4 (empat) emiten BUMN yang masuk dalam 10 (sepuluh) emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

No	PERUSAHAAN	Des 2020
		Kapitalisasi (Rp)
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	5.465.903.792.160
2	PT Aneka Tambang Tbk.	46.499.529.742.875
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	114.003.899.089.275
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	509.208.507.423.000
5	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	18.085.072.500.000
6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	292.214.999.987.350
7	PT Bukit Asam Tbk.	32.373.052.492.500
8	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	10.406.403.654.108
9	PT Indofarma Tbk.	12.490.048.025.000
10	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33.603.943.656.000
11	PT Kimia Farma Tbk.	23.604.500.000.000
12	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	8.280.257.873.200
13	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	40.119.696.064.380
14	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	11.562.808.565.210
15	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	10.578.149.067.840
16	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	73.699.136.000.000
17	PT Timah Tbk.	11.059.913.879.190
18	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	327.895.936.946.000
19	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	17.805.353.473.420
20	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	19.546.489.440.000
21	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	21.869.402.334.480
22	PT Elnusa Tbk.	2.569.072.000.000
23	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	4.319.727.259.500
24	PT PP Properti Tbk.	5.797.513.157.002

No	PERUSAHAAN	Des 2020
		Kapitalisasi (Rp)
25	PT PP Presisi Tbk.	2.678.759.002.000
26	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	2.450.432.000.000
27	PT Waskita Beton Precast Tbk.	7.222.957.164.316
28	PT Wijaya Karya Beton Tbk.	3.364.170.107.600
29	PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1.881.392.751.600
30	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	3.324.444.486.000
31	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.	963.743.954.600
32	PT Phapros Tbk.	1.423.800.000.000
33	PT Bank BRI Syariah Tbk.	22.057.532.016.750

BUMN

1.698.426.547.905.360

IHSG

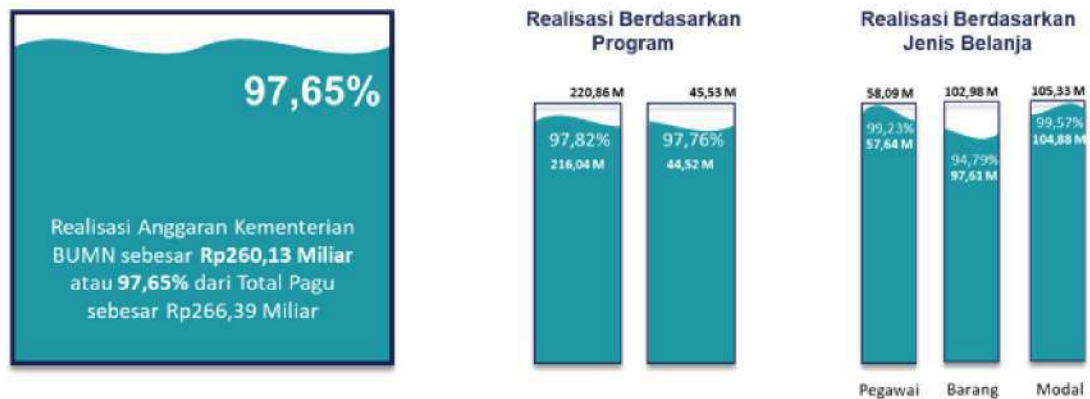
6.970.009.035.557.530

24,37%

TABEL 3.36 Daftar BUMN/anak yang masuk Bursa Saham

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN BUMN

Sebagaimana DIPA Induk Kementerian BUMN tahun 2020 Nomor SP DIPA- 041.01.1.606538/2020 tanggal 12 November 2019 pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp345.832.707.000. Namun, pada bulan April berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, terdapat penghematan Pagu Anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp79.440.156.000 dari semula Rp345.832.707.000 menjadi Rp266.392.551.000 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.10 Realisasi Anggaran Kementerian BUMN 2020

Realisasi Anggaran 2015-2020

dalam Rp Miliar



Gambar 3.11 Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun 2015-2020

Pagu Kementerian BUMN memiliki tren cenderung naik dari tahun 2015 s.d. tahun 2020. Pada tahun 2020, Kementerian BUMN mencapai target realisasi tertinggi, yaitu Rp260.130.543.993 atau sebesar 97,65% dari pagu anggaran Rp266.392.551.000. Kementerian BUMN selalu melakukan upaya dalam optimalisasi penyerapan anggaran dengan disertai penggunaan secara efektif dan akuntabel walaupun pada tahun 2020 terdapat pembatasan kegiatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dengan mengundang pejabat pengelola keuangan dan perwakilan unit kerja untuk mengevaluasi capaian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja atau output.

Selama tahun 2020, Kementerian BUMN telah mengalami beberapa penyesuaian anggaran, baik itu perubahan pos mata anggaran maupun pengurangan anggaran dalam rangka membantu penyuksesan penanganan Pandemi COVID-19 Nasional. Walaupun dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, Kementerian BUMN tetap dapat mengoptimalkan pencapaian program-program kerja yang telah disusun pada tahun 2020. Hal ini dapat terlihat pada realisasi anggaran sebesar 97,65% dan Capaian Kinerja Organisasi mencapai 99,1 dengan predikat “Memuaskan”.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Dalam menjalankan salah satu perannya sebagai *Agent of Development*, BUMN memiliki tanggung jawab sosial yang perlu dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat luas. Atas hal tersebut BUMN melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang di-lead oleh Kementerian BUMN dengan mengadakan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan, antara lain :

D

01 | Penanggulangan Pandemi COVID-19

Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kestabilan Indonesia dari berbagai aspek seperti sosial dan ekonomi, melalui Program TJSL telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan alokasi penyaluran Bina Lingkungan (BL) untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan Pandemi COVID-19, dengan alokasi sebagai berikut:

- Sektor Bencana Alam : Min. 30%;
- Sektor Pendidikan : Min. 30%; dan
- Sektor Pelestarian Alam : Min. 10%

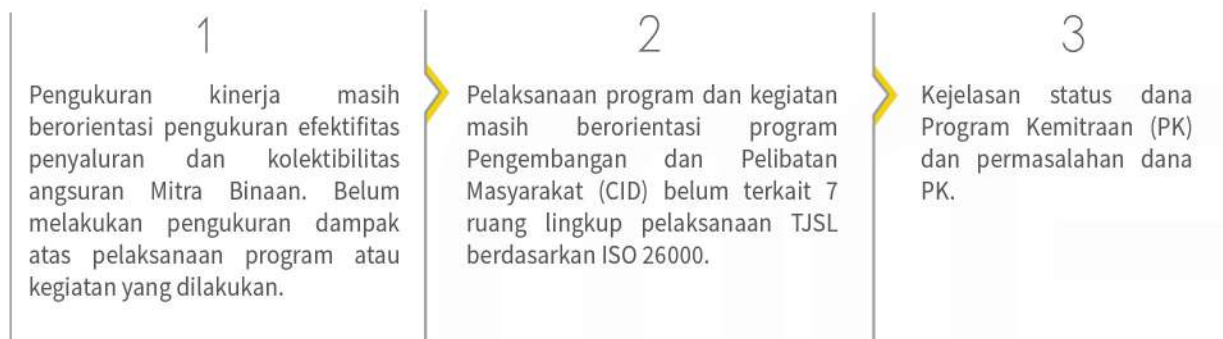
02 | Perubahan Peraturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Perubahan Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL dilakukan untuk mengakomodir penyaluran PKBL kepada Internal perusahaan serta untuk mengakomodir Pandemi COVID-19 yaitu bencana non alam

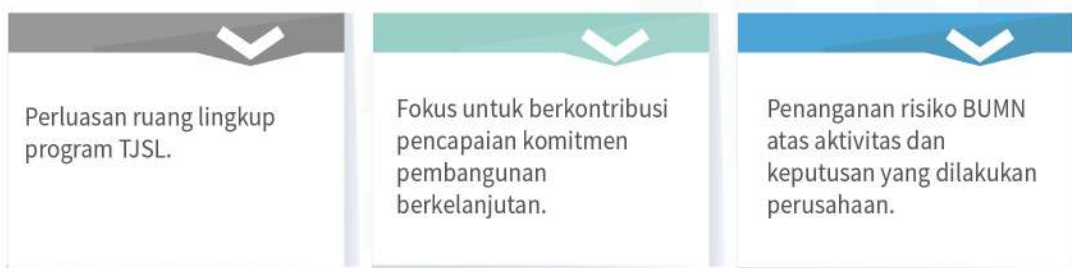
03 | Kebijakan Stimulus Angsuran Mitra Binaan

Adanya dampak Pandemi Covid-19 pada kemampuan pembayaran angsuran Mitra Binaan, telah ditetapkan Surat Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi a.n Menteri BUMN Nomor S-142/MBU/DSI/03/2020 tentang Stimulus untuk Mitra Binaan Program Kemitraan atas Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terintegrasi, terukur dan berdampak pelaksanaannya, maka pada tahun 2020 Keasdepan TJSL telah menyusun *Grand Design* TJSL BUMN yang penyusunannya berdasarkan beberapa evaluasi yang ditemukan antara lain :



Berdasarkan permasalahan tersebut, maka konsep *Grand Design* TJSL kedepan adalah pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berpedoman pada ISO 26000 sebagai pedoman pelaksanaan TJSL dengan nilai tambah yang didapat yaitu :



Program Beasiswa Perguruan Tinggi Bagi Putra Putri TNI dan POLRI

Program beasiswa ini merupakan salah satu program inisiasi Kementerian BUMN bersama dengan 34 BUMN yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 serta sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh TNI dan Polri selama ini, maka dilaksanakan program bantuan beasiswa Perguruan Tinggi bagi Putra Putri TNI dan Polri.

Program Beasiswa Perguruan Tinggi telah diberikan kepada 2.200 orang Putra/Putri TNI dan Polri yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Terdiri dari 607 orang merupakan putra putri dari anggota Polri dan 1.593 orang merupakan putra putri dari anggota TNI. Jumlah bantuan beasiswa yang diberikan adalah sebesar Rp11.000.000.000,- dalam bentuk 2.200 tabungan pendidikan, dimana masing-masing anak akan menerima sebesar Rp5.000.000,-.

Penyerahan simbolis kepada penerima beasiswa telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan di Gedung Kementerian BUMN yang dihadiri oleh Menteri BUMN dan perwakilan dari TNI dan Polri.







4

PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN

PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KEMENTERIAN BUMN

Mengawali Tahun 2020, penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) mulai menjadi perhatian internasional. Infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan ini bermula di Wuhan, Tiongkok. Virus secara internasional memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan tingkat kesehatan masyarakat dunia. Dengan adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara berimplikasi pada penurunan perekonomian negara-negara dunia termasuk negara adidaya Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sejak ditemukan kasus *suspect* pertama di Indonesia pada sekitar bulan Maret tahun 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat sehingga hampir menembus angka 1 juta pada akhir tahun 2020. Sebagaimana yang terjadi pada negara-negara lain, pembatasan pergerakan orang juga menjadi kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini langsung berpengaruh pada perekonomian Indonesia secara signifikan. Baik usaha kecil maupun korporasi terdampak signifikan karena adanya penyebaran virus ini.

Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 antara lain :

- Menetapkan Wabah COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- Pemberian Bantuan Sosial;
- Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis;
- Penyiapan Program Vaksin dan sebagainya

Tentunya, sebagai bagian Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian BUMN turut melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 baik di Kementerian BUMN maupun BUMN. Langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dalam mencegah penyebaran COVID-19 di internal Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

A | Menyusun Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19

Adapun langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Kementerian BUMN diawali dengan penyusunan Protokol Kesehatan yang dapat diterapkan baik Kementerian BUMN dan BUMN. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat. Adapun bentuk instrumen pelaksanaan protokol kesehatan yang dihasilkan oleh Kementerian BUMN beberapa macam, seperti penetapan Surat Edaran maupun Nota Dinas yang disampaikan kepada pihak terkait baik itu Kementerian BUMN maupun BUMN sendiri. Hal ini juga turut mengubah budaya kerja serta organisasi di Lingkungan Kementerian BUMN. Seperti adanya penerapan *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) dengan persentase maksimal pegawai yang masuk kantor adalah 25%, penerapan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak), Swab PCR/Antigen Rutin dan sebagainya

B Digitalisasi Proses Bisnis

Dengan adanya penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kementerian BUMN, turut berdampak terhadap pelaksanaan proses bisnis di Kementerian BUMN, seperti penggunaan *teleconference*, presensi digital, hingga tanda tangan elektronik.

C Tes Antigen /PCR Berkala

Secara berkala Kementerian BUMN juga turut melaksanakan Tes *Antigen*/PCR bagi pegawai maupun pengelola gedung di Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian BUMN. Dengan adanya tes *Antigen*/PCR secara berkala, Kementerian BUMN dapat secara langsung memonitor dan memberikan penanganan bagi Pegawai yang terinfeksi COVID-19.

D Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai upaya Pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19 yang mengancam perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah telah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program tersebut dapat diberikan dalam bentuk PMN, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan yang salah satu target pelaksanaan programnya diberikan kepada BUMN. Dalam rangka pelaksanaan program PEN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan bantuan berupa PMN dan Investasi Pemerintah (IP) kepada BUMN yang dinilai layak. Kementerian BUMN melalui Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko telah memberikan dukungan pada setiap proses yang diperlukan hingga tahanan pencairan dana PMN dan IP tersebut.

BUMN Penerima dan Progres Penyerapan Dana PMN dan IP PEN yang diberikan tergambar dalam tabel berikut:

No	BUMN	Ket	Progres
1	PT Garuda Indonesia (Persero) TBK	IP	- Tanggal 28 Des 2020 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Penerbitan OWK antara Perseroan sebagai Penerbit Obligasi dan Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan cq. PT SMI sebagai pemegang investasi - Pencarian dan/atau penerbitan OWK Pertama sebesar Rp 1 Triliun dengan tenor 3 tahun pada minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-3 Januari 2021
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	IP	Pencarian dana PEN dari RKUN ke RIPPEN tanggal 29 Desember 2020
3	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	IP	Dana telah cair tanggal 7 Desember 2020
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	IP	- Pencarian dana OWK sampai rekening KRAS tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 2,2T - Pencairan berikutnya senilai Rp 0,8T disepakati dilakukan pada bulan Desember 2021

5	Perum Perumnas	IP	- Dana IP PEN Tahap ke-1 sebesar IDR200 miliar sudah cair - Dana IP PEN Tahap ke-2 sebesar IDR450 miliar ditargetkan pada minggu ketiga Januari
6	PT Utama Karya (Persero)	PMN	Sudah cair sesuai PP no. 71/2020
7	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	PMN	Sudah cair sesuai PP no. 71/2020
8	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	PMN	Sudah cair sesuai PP no.63/2020
9	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / "ITDC"	PMN	Sudah cair sesuai PP no. 64/2020
10	PT Bio Farma (Persero)	PMN	Sudah cair sesuai PP no. 80/2020

TABEL 4.1 BUMN Penerima dan Progres Penerapan Dana PMN dan IP PEN

E Subsidi/Bunga Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) antara lain:



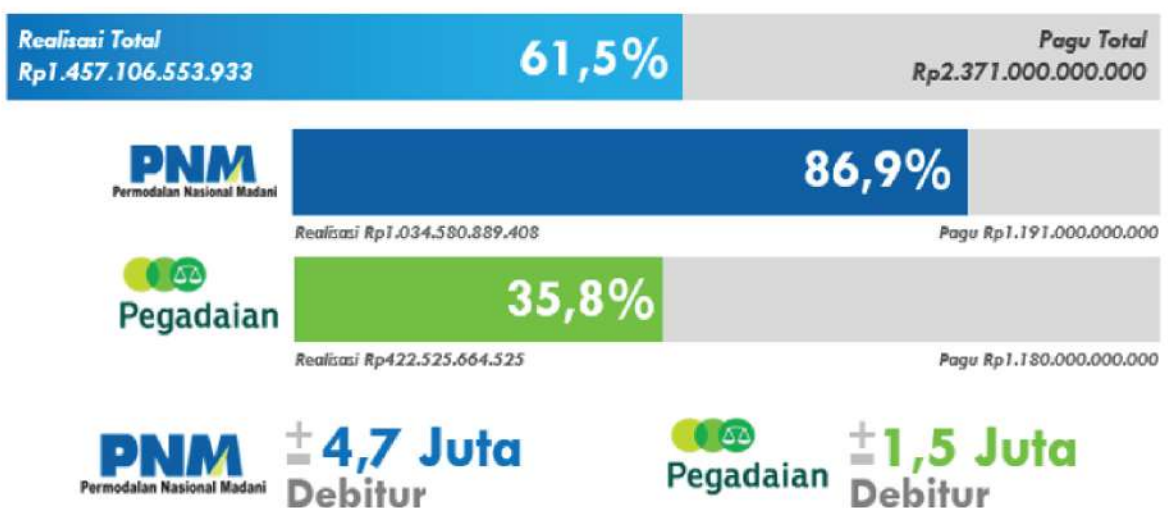
Gambar 4.1 Dasar Hukum Pelaksanaan PEN untuk UMKM

Dalam rangka mengatur mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemberian subsidi, dan persyaratan debitur, maka Menteri Keuangan telah menunjuk Sekretaris Kementerian BUMN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 309/KMK.02/2020. Berdasarkan KMK tersebut diatas, Sekretaris Kementerian BUMN selaku KPA telah menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) Dalam Rangka Penerbitan DIPA Tahun 2020 kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menunjuk Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pejabat Perbendaharaan) Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan menetapkan Standar Prosedur Operasi atas Pengujian dan Pembayaran serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka

Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program PEN berupa pemberian subsidi bunga/subsidi margin yang dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian BUMN selaku KPA dianggarkan sebesar Rp2.371.000.000.000,00 yang akan disalurkan masing-masing sebesar Rp1.180.000.000.000,00 kepada 9.453.618 debitur UMKM yang terdiri atas 3.292.623 debitur PT Pegadaian dan Rp1.191.000.000.000,00 kepada 6.096.415 debitur Mekaar dan 64.580 debitur ULaMM PT PNM. Kegiatan PT Pegadaian yang dapat didanai oleh program ini adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dengan mekanisme penyaluran langsung kepada debitur dengan barang jaminan melalui kantor layanan PT Pegadaian. Sedangkan kegiatan PT PNM yang dapat didanai oleh program ini adalah pembiayaan dengan pembinaan dan pelatihan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro (Mekaar) dan pelaku usaha mikro kecil menengah (ULaMM) dengan mekanisme penyaluran langsung kepada kelompok pelaku usaha ultra mikro dan UMKM melalui *Account Officer* (AO) dan kantor layanan PT PNM.

Realisasi Belanja Subsidi Bunga/Margin Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Realisasi Belanja Subsidi Bunga/Margin Tahun Anggaran 2020

F | Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal Negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Adapun BUMN penerima PMN TA 2020 dilakukan berdasarkan dua mekanisme yaitu mekanisme APBN dan mekanisme Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN). Mekanisme IP-PEN ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak triwulan I tahun 2020 sehingga pemerintah mengambil langkah responsif dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Rincian BUMN penerima PMN TA 2020 adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal (Rp Triliun)	Keterangan
A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020			
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5	PP No.37/2020
2	PT Hutama Karya (Persero)	3,5	PP No.32/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1	PP No.31/2020
4	PT Bahana PUI (Persero) - Non Tunai	0,268	PP No.67/2020
5	PT PANN (Persero) - Non Tunai	3,762	Masih Proses
B. Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional			
BI	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 jo. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020		
BI.1	Pembiayaan Investasi kepada BUMN		
1	PT Hutama Karya (Persero)	7,5	PP No.71/2020
2	PT Bahana PUI (Persero)	6	PP No.72/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1,5	PP No.63/2020
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/"ITDC"	0,5	PP No.64/2020
SUB TOTAL BI.1		15,5	
BI.2	Investasi Pemerintah berupa Pinjaman		
1	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	8,5	-
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,5	-
3	Perum Perumnas	0,65	-
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4	-
5	PT Krakatau Steel (Persero).Tbk	3	-
Sub Total BI.2		19,65	
Sub Total BI		35,15	
BI.1	Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 381/KMK.02/2020 jo. 500/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) TA 2020		
1	PT Bio Farma (Persero)	2	PP No.80/2020
Sub Total BI.2		2	
Total B		37,15	
TOTAL A+B		50,68	

TABEL 4.2 Rincian BUMN Penerima PMN TA 2020

Selanjutnya dalam rangka penguatan kapasitas BUMN (PMN) di tahun 2021, Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dalam rencana penambahan PMN TA 2021 pada BUMN. Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah melakukan penambahan PMN kepada 7 BUMN dibawah binaan Kementerian BUMN melalui mekanisme APBN sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan pada UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021.

Rincian BUMN penerima PMN TA 2021 adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Nominal (RP Triliun)
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5
2	PT Hutama Karya (Persero)	6,208
3	PT Bahana PUI (Persero)	20
4	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1,2
5	PT Pengembangan Parawisata Indonesia (Persero)/ *ITDC*	0,47
6	PT PAL Indonesia (Persero)	1,28
7	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	0,977
TOTAL		35,135

TABEL 4.3 Rincian BUMN Penerima PMN TA 2021

E | SIBV *Safe Guard Label* Kesiapan Kementerian BUMN dalam Pencegahan Penyebaran COVID-10



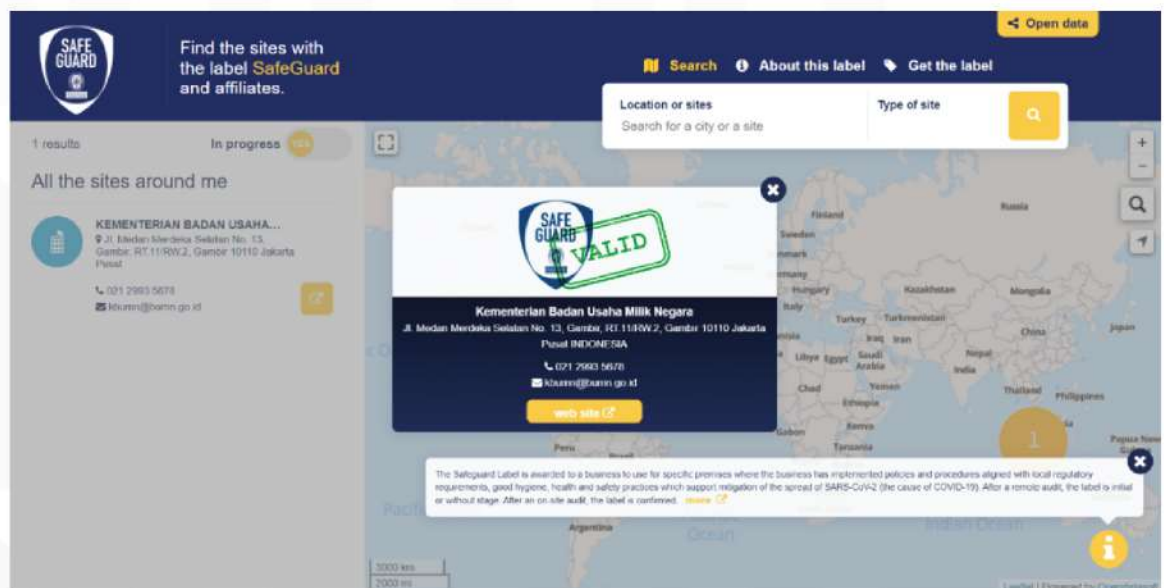
Dalam rangka perolehan Surveyor Indonesia Bureau Veritas (SIBV) *Safe Guard Label* Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diwakili oleh Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru Kementerian BUMN telah menjalani fase audit pada bulan September 2020. SIBV *Safe Guard Label* merupakan sebuah program pemberian label hasil audit penilaian secara independen atas kesiapan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Bureau Veritas dengan misi membantu upaya pemerintah dalam pencegahan rantai penyebaran virus COVID-19 dan memberikan serangkaian solusi untuk memenuhi kebutuhan perkantoran. Entitas yang telah lulus audit akan ditandai dengan pemasangan label kesiapan (*Safe Guard Label*) dan Atestasi (*Attestation Letter*) yang menyatakan kesiapan instansi tersebut dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Proses audit SIBV *Safe Guard Label* dilaksanakan secara tatap muka dan remote audit. Ruang lingkup audit/penilaian meliputi: pengetahuan dan pelatihan dasar pegawai; manajemen tamu dan pegawai; perlindungan pegawai; penerapan social distancing; kebersihan diri sendiri dan ruang kerja; dan standar fasilitas dan ruang kerja. Label SIBV *Safe Guard* berlaku selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dapat dilakukan audit ulang dengan periode 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan regulasi ke depan.

Dalam rangka perolehan Surveyor Indonesia Bureau Veritas (SIBV) *Safe Guard Label* Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang diwakili oleh Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru Kementerian BUMN telah menjalani fase audit pada bulan September 2020. SIBV *Safe Guard Label* merupakan sebuah program pemberian label hasil audit penilaian secara independen atas kesiapan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Bureau Veritas dengan misi membantu upaya pemerintah dalam pencegahan rantai penyebaran virus COVID-19 dan memberikan serangkaian solusi untuk memenuhi kebutuhan perkantoran. Entitas yang telah lulus audit akan ditandai dengan pemasangan label kesiapan (*Safe Guard Label*) dan Atestasi (*Attestation Letter*) yang menyatakan kesiapan instansi tersebut dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Proses audit SIBV *Safe Guard Label* dilaksanakan secara tatap muka dan remote audit. Ruang lingkup audit/penilaian meliputi: pengetahuan dan pelatihan dasar pegawai; manajemen tamu dan pegawai; perlindungan pegawai; penerapan social distancing; kebersihan diri sendiri dan ruang kerja; dan standar fasilitas dan ruang kerja. Label SIBV *Safe Guard* berlaku selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dapat dilakukan audit ulang dengan periode 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan regulasi ke depan.

Berdasarkan hasil audit, Kementerian BUMN dinyatakan layak memperoleh label SIBV *Safe Guard* per tanggal 14 September 2020 (dapat diakses pada laman: (<https://restartwith.bureauveritas.com/pages/home/>)) dengan hasil audit “*Satisfactory*”, yang menandakan Kementerian BUMN siap bekerja dalam era tatanan dunia baru dengan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak sesuai protokol dan praktik global yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



Gambar 4.3 SIBV *Safe Guard Label* Kementerian BUMN







5

PENUTUP

PENUTUP

Dalam mewujudkan 5 (lima) Prioritas Kementerian BUMN, Kementerian BUMN menempuh program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2020, Kementerian BUMN telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, disebabkan adanya faktor eksternal dan kendala teknis lainnya. Selain itu dengan adanya pandemik COVID-19 juga turut berpengaruh secara besar dalam mempengaruhi pencapaian kinerja Kementerian BUMN dan BUMN. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan yang mempengaruhi pencapaian target kedepannya yang selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun di periode depan.

Dari total 19 IKU, sebanyak 15 IKU telah tercapai sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara masih terdapat empat IKU yang belum mencapai target yaitu

- (1) Kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, dan PNBPN);
- (2) Realisasi Belanja Modal (CAPEX);
- (3) Kapitalisasi Saham BUMN; dan
- (4) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat.

Adapun indikator kinerja yang berhasil mencapai target bahkan melebihi target pada tahun 2020, yaitu

- (1) Jumlah BUMN yang masuk peringkat global;
- (2) Pembentukan Holding BUMN;
- (3) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- (4) Net Profit;
- (5) Penyelesaian Retrukturisasi Hutang BUMNN (RDI/SLA, Hutang Tidak Produktif, BUMN Tidak Sehat);
- (6) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE);
- (7) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN;
- (8) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN;
- (9) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan;
- (10) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO;
- (11) Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri;
- (12) Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/Anak;
- (13) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
- (14) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN; dan
- (15) Rasio Keterwakilan Perempuan dalam BOD/BOC BUMN.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih selama tahun 2020, tentunya Kementerian BUMN tidak akan berpuas diri, melainkan akan terus menerus melakukan perbaikan yang berkesinambungan, agar berbagai program yang telah direncanakan dapat ter-delivery dengan baik hingga kepada pemangku kepentingan.

Adapun langkah perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan Kementerian BUMN kedepannya, antara lain:

- Mengelaborasi proses perencanaan kinerja di Kementerian agar alur *Top-Down* arahan dan tujuan pimpinan dapat menjadi lebih selaras pada proses bisnis di Lingkungan Kementerian BUMN.
- Mengevaluasi IKU yang tidak tercapai serta mengkomunikasikannya kepada pimpinan agar mendapatkan solusi perbaikan pada periode mendatang..
- Mengoptimalkan program unggulan serta menyusun langkah strategis yang lebih purna di Lingkungan Kementerian agar tercapainya Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian BUMN.
- Melakukan monitoring implementasi hasil evaluasi kinerja bulanan yang dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga dapat menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- Melakukan *Benchmarking* ke Instansi Pemerintah dan Perusahaan berkelas regional yang memiliki pengelolaan kinerja organisasi dan/atau reformasi birokrasi.





LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2020

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



ERICK THOHIR

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Tahun Anggaran : 2020

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
A. Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional			
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	1) Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
		2) Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,07 M/Org
		3) Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	9%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	4) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,0 (Indeks)
		5) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP
B. Mewujudkan Kemandirian dan Korporatisasi BUMN			
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai korporasi	6) Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70%
		7) Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	60%
		8) Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	80%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	9) Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	33
		10) Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	2,41%
C. Meningkatkan Keunggulan dan Daya Saing BUMN			
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	11) Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	30

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
		12) Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	10 BUMN/ anak
6	BUMN Unggul di Kancan Global	13) Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	4 BUMN
		14) Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 <i>Holding</i>
D. Memaksimalkan Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan			
7	Kontribusi BUMN Terhadap Penerimaan Negara	15) Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBPN)	Rp354,42 T
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	16) Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp329,17 T
		17) Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	13%
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk Pemegang Saham	18) Net Profit	Rp16,99 T
		19) Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.756 T

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	Rp220.856.115.000,00
2. Program Pembinaan BUMN	Rp45.536.436.000,00
Total Anggaran	Rp266.392.551.000,00

Jakarta, Agustus 2020

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



ERICK THOHIR



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

TRAJECTORY TARGET
PERJANJIAN KINERJA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2020

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	n.a	n.a	n.a	81	Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020.
2.	Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp3,07 M/Org	Rp3,00 M/Org	Rp3,02 M/Org	Rp3,05 M/Org	Rp3,07 M/Org	Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan BUMN dan Jumlah Tenaga Kerja Tetap BUMN.
3.	Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam BOD/BOC BUMN	9%	8%	8,2%	8,5%	9%	Diperoleh dari perbandingan antara BOD/BOC perempuan dan total BOD/BOC pada BUMN.
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SPBE)	3,0 (Indeks)	n.a	n.a	3,0	3,0	Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah terkait.
5.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	n.a.	n.a.	WTP	WTP	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
6.	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70%	n.a	n.a	n.a	70%	Pada Tahun 2020 ditargetkan BUMN yang berkategori sehat sebesar 70% dari total 114 BUMN



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
7.	Harmonisasi Regulasi Tata Kelola BUMN	60%	50%	55%	55%	60%	Jumlah/Progress Regulasi Tata Kelola BUMN yang telah diharmonisasi
8.	Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	80%	n.a.	n.a.	n.a.	80%	Berasal dari hasil survei kepada BUMN untuk menunjukkan kepatuhan BUMN dalam hal regulasi
9.	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	33	n.a.	n.a.	n.a.	33	Jumlah anak BUMN yang telah melakukan IPO pada bursa saham
10.	Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	2,41%	n.a.	n.a.	n.a.	2,41%	Berdasarkan data RKAP 2020 Revisi.
11.	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	30	n.a.	n.a.	n.a.	30	Target jumlah negara tujuan ekspor didasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas pada saat pembahasan RPJMN 2020-2024
12.	Perbaikan level INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index) BUMN/ anak	10 BUMN/ anak	n.a.	n.a.	n.a.	10 BUMN/ anak	Target 2020-2024 didasarkan pada jumlah BUMN/ anak usaha yang telah menerapkan INDI 4.0 (sudah matang dalam menerapkan INDI 4.0)
13.	Jumlah BUMN yang Masuk Peringkat Global	4 BUMN	n.a.	n.a.	n.a.	4 BUMN	BUMN yang diharapkan bisa masuk peringkat global yaitu: Global Fortune: Pertamina, PLN, Forbes 2000: Telkom, BRI, Mandiri, BNI, PT Semen Indonesia



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
14.	Pembentukan <i>Holding</i> BUMN	1 Holding	n.a.	n.a.	n.a	1 Holding	Ditarget 2020-2024 akan terbentuk <i>holding</i> antara holding berikut: Jasa Survei, Asuransi, Industri Pangan, Manufaktur, Pertahanan, Media, Pelabuhan, Transportasi dan Pariwisata
15	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp354,42 T	Rp53,16 T	Rp141,76 T	Rp212,65 T	Rp354,42 T	Target pada tahun 2020, merupakan angka RKAP 2020 Revisi sebagai berikut: a. Pajak : Rp229,85 T b. PNBP : Rp80,82 T c. Dividen : Rp43,75 T (Trajectory: 15%, 40%, 60% 100%)
16	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp329,17 T	Rp65,83 T	Rp131,66 T	Rp197,50 T	Rp329,17 T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2020 Revisi pada Silaba (Trajectory : 20%, 40%, 60%, 100%)
17	Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	13%	13%	13%	13%	13%	Persentase kontribusi EBT BUMN dibandingkan kapasitas terpasang Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
18	Net Profit	Rp16,99T	Rp4,24 T	Rp6,79 T	Rp11,04 T	Rp16,99 T	Berdasarkan hasil rekapitulasi data RKAP 2020 revisi pada Silaba (Trajectory : 25%, 40%, 65%, 100%)



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Target Trajectory				Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
19	Kapitalisasi Saham BUMN	Rp1.756T	Rp1.700 T	Rp1.725 T	Rp1.730 T	Rp1.756 T	Berdasarkan data RKAP 2020 Revisi

Jakarta, Agustus 2020

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta Pusat 10110

www.bumn.go.id

